

**SKRIPSI**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR SOSIAL EKONOMI YANG  
MEMPENGARUHI KEMISKINAN DALAM MEWUJUDKAN  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DI  
SUMATERA SELATAN**

***ANALYSIS OF SOCIAL ECONOMIC FACTORS AFFECTING  
POVERTY IN REALIZING THE SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT GOALS (SDGs) IN SOUTH SUMATERA***



**Dwi Anggun Pangestu  
05011381621131**

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2020**

## **SUMMARY**

**DWI ANGGUN PANGESTU.** Analysis of Social Economic Factors Affecting Poverty in Realizing the Sustainable Development Goals (SDGs) in South Sumatera (Supervised by **M. YAMIN** and **LIFIANTHI**).

The purpose of this research is to, 1) Knowing what percentage of the poor population is when the sustainable development goals (SDGs) are completed in South Sumatra, 2) Identifying social economic factors that influence poverty in South Sumatra, and 3) Formulate strategies in an effort to accelerate poverty reduction in support of sustainable development goals (SDGs) targets in South Sumatra. This research was conducted in South Sumatra Province. The location of research was selected purposely. The research data collection was carried out in January 2020. The results of forecasting the percentage of poor people in South Sumatra Province in 1999 to 2030 decreased by 17.62 percent. It is estimated that in 2030 the percentage of poor people in South Sumatra will be 5.87 percent. It is expected that the percentage of poor people can decrease every year in accordance with one of the goals of sustainable development goals (SDGs), namely without poverty. Social economic factors that significantly affect poverty are unemployment and average length of schooling. The strategies used to reduce poverty levels in South Sumatra are sustainable poverty reduction, empowerment programs in the economic sector, strengthening the provincial government in controlling and evaluating the implementation of development planning, improving human resource skills in regional planning, providing entrepreneurship training, managing existing land in order to be more productive, open up jobs and provide assistance in the form of training, capital and facilities / infrastructure.

**Keywords:** SWOT Analysis, Sosial Economic Factor, Poverty, Forecasting, SDGs

## RINGKASAN

**DWI ANGGUN PANGESTU.** Analisis Faktor-Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Kemiskinan dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Sumatera Selatan (Di bimbing oleh **M. YAMIN** dan **LIFIANTHI**).

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk 1) Mengetahui berapa persentase penduduk miskin saat selesainya periode *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Sumatera Selatan, 2) Mengidentifikasi faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kemiskinan di Sumatera Selatan, dan 3) Merumuskan strategi dalam upaya mempercepat penurunan kemiskinan dalam mendukung target sustainable development goals (SDGs) di Sumatera Selatan. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan. Lokasi penelitian dipilih secara sengaja. Pelaksanaan pengambilan data penelitian dilakukan pada bulan Januari 2020. Hasil peramalan (*forecast*) persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 1999 hingga tahun 2030 menurun sebanyak 17,62 persen. Diperkirakan tahun 2030 persentase penduduk miskin Sumatera Selatan sebesar 5,87 persen. Hal ini diharapkan persentase penduduk miskin dapat menurun setiap tahunnya sesuai dengan salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) yaitu tanpa kemiskinan (*no poverty*). Faktor-faktor sosial ekonomi yang berpengaruh nyata terhadap kemiskinan adalah pengangguran dan rata-rata lama sekolah. Strategi yang digunakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan yaitu dengan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan, program pemberdayaan di sektor ekonomi, Memperkuat pemerintah provinsi dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, meningkatkan keterampilan SDM di bidang perencanaan daerah, memberikan pelatihan kewirausahaan, mengelola lahan yang ada agar lebih produktif, membuka lapangan pekerjaan dan memberikan bantuan berupa pelatihan, permodalan serta sarana/prasarana

Kata kunci: Analisis SWOT, Faktor Sosial Ekonomi, Kemiskinan, Peramalan, SDGs

**SKRIPSI**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR SOSIAL EKONOMI YANG  
MEMPENGARUHI KEMISKINAN DALAM MEWUJUDKAN  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DI  
SUMATERA SELATAN**

***ANALYSIS OF SOCIAL ECONOMIC FACTORS AFFECTING  
POVERTY IN REALIZING THE SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT GOALS (SDGs) IN SOUTH SUMATERA***

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Pertanian Pada  
Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya



**Dwi Anggun Pangestu  
05011381621131**

**PROGRAM STUDI AGRIBISNIS  
JURUSAN SOSIAL EKONOMI PERTANIAN  
FAKULTAS PERTANIAN  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
2020**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR SOSIAL EKONOMI YANG  
MEMPENGARUHI KEMISKINAN DALAM MEWUJUDKAN  
SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs)  
DI SUMATERA SELATAN**

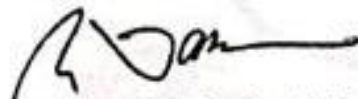
**SKRIPSI**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana Pertanian pada  
Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya

**Oleh:**

**Dwi Anggun Pangestu  
05011381621131**

**Pembimbing I**



**Dr. Ir. M. Yamin, M.P.  
NIP 196609031993031001**

**Indralaya,  
Pembimbing II**

**2020**



**Dr. Ir. Lifinthy, M.Si.  
NIP 196806141994012001**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Pertanian**



**Prof. Dr. Ir. Andy Mulyana, M.Sc.  
NIP 196012021986031003**

Skripsi dengan Judul “Analisis Faktor-Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Kemiskinan Dalam Mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) di Sumatera Selatan” oleh Dwi Anggun Pangestu telah dipertahankan di hadapan Komisi Penguji Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya pada tanggal 14 Agustus 2020 dan telah diperbaiki sesuai saran dan masukan tim penguji.

### Komisi Penguji

1. Dr. Ir. M. Yamin, M.P.  
NIP 196609031993031001

Ketua

(.....)

2. Dr. Ir. L. I. fianthi, M.Si.  
NIP 196806141994012001

Sekretaris

(.....)

3. Dr. Agustina Bidarti, S.P., M.Si.  
NIP 197708122008122001

Anggota

(.....)

4. Ir. Yulian Junaidi, M.Si.  
NIP 196507011989031005

Anggota

(.....)

Indralaya, September 2020  
Ketua jurusan  
Sosial-Ekonomi Pertanian



Dr. Ir. Maryadi, M.Si.  
NIP 196501021992031001

## PERNYATAANINTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dwi Anggun Pangestu

NIM : 05011381621131

Judul :“Analisis Faktor-Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Kemiskinan dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Sumatera Selatan”

Menyatakan bahwa seluruh informasi yang saya sajikan dalam skripsi ini merupakan hasil saya sendiri di bawah supervise pembimbing, kecuali yang disebutkan dengan jelas sumbernya. Apabila di kemudian hari ditemukan adanya unsur plagiasi dalam penelitian skripsi ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik dari Universitas Sriwijaya.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak mendapat paksaan dari pihak manapun.

Palembang, September 2020



[Dwi Anggun Pangestu]

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis dilahirkan di Kota Palembang pada tanggal 18 Oktober 1998. Penulis merupakan anak kedua dari dua bersaudara. Orang tua penulis bernama Bambang Hermanto dan Sri Astati.

Penulis menyelesaikan pendedikan sekolah dasar padatahun 2010 di SD Negeri 131 Kota Palembang, lalu menyelesaikan sekolah menengah pertama di SMP Muhammadiyah 4 Kota Palembang pada tahun 2013, serta pada tahun 2016 penulis menyelesaikan sekolah menengah atas di SMA Muhammadiyah 1 Kota Palembang. Pada tahun 2016 penulis terdaftar sebagai mahasiswi di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya melalui Seleksi Ujian Mandiri. Pada saat ini penulis merupakan mahasiswa aktif di Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya kampus Palembang.

Semasa kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya penulis telah melaksanakan praktik lapangan dengan judul “Budidaya Kemangi (*Ocimum sanctum*) menggunakan Teknik Vertikultur dengan Pemanfaatan Limbah Budidaya Lele dengan Sistem Bioflok di Kecamatan Ilir Barat I”. Selain itu penulis juga telah melaksanakan praktik kerja lapangan/magang dengan judul laporan “Produk dan Jasa Unit Usaha Syariah di Bank Sumsel Babel Syariah Sumatera Selatan”.



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “ Analisis Faktor-Faktor Sosial Ekonomi yang Mempengaruhi Kemiskinan dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Sumatera Selatan” .

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan berupa dorongan, semangat, dukungan, bimbingan, kerjasama maupun nasihat dari berbagai pihak yaitu:

1. Allah SWT yang telah kemudahan serta kelancaran kepada saya dalam menjalankan proses penulisan skripsi ini.
2. Kedua orang tua saya; Ayah dan Ibu, yang senantiasa memberikan doa, perhatian dan kasih sayang, dukungan, serta dorongan moril maupun materil kepada saya.
3. Bapak Dr. Ir. M. Yamin, M.P. selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Ir. Lifiathi, M.P. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, penjelasan serta arahan selama proses penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Ibu Dr. Agustina Bidarti, S.P., M.Si. dan Bapak Ir. Yulian Junaidi, M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran, masukan serta nasihat hingga penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Dr. Ir Maryadi, M.Si. sebagai Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian yang telah memberikan izin sehingga penyusunan skripsi ini dapat dilaksanakan.
6. Saudara dan sepupu saya yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan motivasi agar saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Agus selaku karyawan Badan Pusat Statistik Provinsi (BPS) Provinsi Sumatera selatan yang telah membantu dan memberikan izin dalam pengambilan data penelitian dan mempermudah saya dalam proses penelitian berlangsung.

8. Teman-teman seperjuangan yang telah memberikan bantuan, semangat serta informasi selama proses penyusunan skripsi ini dilaksanakan.

Kiranya masih banyak lagi yang membantu penulis yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu dalam kata pengantar ini. Adapun penulis menyadari bahwa tulisan dalam skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Maka penulis mengucapkan terima kasih terhadap kritik dan saran yang diberikan, demi penulisan yang lebih baik di masa yang akan datang. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat sebagai tambahan pustaka yang akan datang.

Palembang, September 2020



Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	ix
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB 1. PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	4
BAB 2. KERANGKA PEMIKIRAN .....	5
2.1. Tinjauan Pustaka.....	5
2.1.1. Konsepsi <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) .....	5
2.1.2. Teori Kemiskinan.....	7
2.1.3. Penyebab Kemiskinan .....	10
2.1.4. Pengukuran Kemiskinan.....	11
2.1.5. Lingkaran Kemiskinan .....	13
2.1.6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan .....	14
2.2. Model Pendekatan Penelitian Secara Diagramatis .....	18
2.3. Hipotesis .....	19
2.4. Batasan Operasional.....	19
BAB 3. PELAKSANAAN PENELITIAN.....	22
3.1. Tempat dan Waktu .....	22
3.2. Metode Penelitian .....	22
3.3. Metode Pengumpulan Data .....	22
3.4. Metode Pengolahan Data .....	23
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN .....	28
4.1. Keadaan Umum .....	28
4.1.1. Letak dan Batas Wilayah Administrasi .....	28
4.1.2. Keadaan Topografi .....	29
4.1.3. Jumlah Penduduk.....	29

	Halaman
4.1.4. Keadaan Ekonomi Sektor Pertanian .....	31
4.2. Peramalan ( <i>Forecasting</i> ) Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Selatan saat Berakhirnya Periode Sustainable Development Goals (SDGs) .....	33
4.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan .....	37
4.4. Pembahasan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Sumatera Selatan (SDGs) .....	38
4.4.1. Pengaruh Pengangguran terhadap Persentase Penduduk Miskin .....	38
4.4.2. Pengaruh PDRB Pertanian terhadap Persentase Penduduk Miskin .....	39
4.4.3. Pengaruh Nilai Tukar Petani terhadap Persentase Penduduk Miskin.....	39
4.4.4. Pengaruh Rata-Rata Lama Sekolah terhadap Persentase Penduduk Miskin .....	40
4.4.5. Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Persentase Penduduk Miskin .....	41
4.4.6. Pengaruh PDRB Total Terhadap Persentase Penduduk Miskin.....	41
4.5. Pengujian terhadap Model Regresi.....	42
4.5.1. Uji Koefisien Determinasi .....	42
4.5.2. Uji F .....	42
4.5.3. Uji T .....	43
4.6. Uji Asumsi Klasik .....	44
4.6.1. Uji Normalitas .....	44
4.6.2. Uji Multikolinearitas .....	45
4.6.3. Uji Heterokedastisitas .....	46
4.6.4. Uji Autokorelasi .....	47
4.7. Upaya Menurunkan Tingkat Kemiskinan dalam Mendukung Target <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) di Sumatera Selatan .....	48
4.7.1. Strategi Penurunan Tingkat Kemiskinan .....	50
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN .....	52
5.1. Kesimpulan .....	52
5.2. Saran .....	52
DAFTAR PUSTAKA .....	53
LAMPIRAN .....	55

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Lingkaran Kemiskinan Permintaan dan Penawaran.....	13
Gambar 2.2. Model Pendekatan Penelitian Secara Diagramatis .....	18
Gambar 4.1. <i>Trendline</i> Persentase Penduduk Miskin.....	34
Gambar 4.2. Grafik P-P Plot Uji Normalitas .....	45
Gambar 4.3. <i>Scatterplot</i> Hasil Uji Normalitas .....	47

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan.....	3
Tabel 3.1. Faktor Strategi Internal dan Eksternal.....	27
Tabel 4.1. Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan ...	28
Tabel 4.2. Jumlah Penduduk Muskin Berdasarkan Jenis Kelamin .....	30
Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur .....	30
Tabel 4.4. Data Peramalan Persentase Penduduk Miskin.....	36
Tabel 4.5. Hasil Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan di Sumatera Selatan .....	38
Tabel 4.6. Nilai <i>Tolerance</i> dan VIF Uji Multikolinearitas .....	46
Tabel 4.7. Hasil Matriks Analisis Swot .....	49

## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Peta Provinsi Sumatera Selatan .....	55
Lampiran 2. Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan .....	56
Lampiran 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Sumatera Selatan .....	57
Lampiran 4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Sumatera Selatan .....	58
Lampiran 5. Data Peramalan Persentase Penduduk Miskin di Sumatera Selatan .....	59
Lampiran 6. Jumlah Penduduk Miskin di Sumatera Selatan .....	60
Lampiran 7. Jumlah Pengangguran di Sumatera Selatan .....	61
Lampiran 8. PDRB Sektor Pertanian Sumatera Selatan .....	62
Lampiran 9. Nilai Tukar Petani Sumatera Selatan .....	63
Lampiran 10. Rata-Rata Lama Sekolah Sumatera Selatan .....	64
Lampiran 11. Upah Minimum Provinsi di Sumatera Selatan .....	65
Lampiran 12. PDRB Total Atas Dasar Harga Konstan Sumatera Selatan .	66
Lampiran 13. Hasil Analisis Regresi Menggunakan Aplikasi SPSS .....	67
Lampiran 14. Hasil Matriks Analisis SWOT .....	69

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1.Latar Belakang

SDGs (*Sustainable Development Goals*) merupakan inisiatif global yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan manusia menjadi lebih baik dalam aspek sosial dan ekonomi serta dapat bersinergi dengan lingkungan. Pada penyusunannya, disadari penuh bahwa inisiatif global ini tidak dapat menampikkan adanya implementasi di tingkat regional dan nasional. SDGs di tingkat regional dan nasional pun perlu meneguhkan kembali semangat dan nilai SDGs yang inklusif dan partisipatif sebagaimana yang telah dibangun dalam SDGs tingkat global. Peran negara sangat krusial dalam memastikan bahwa pelaksanaan SDGs mendasarkan pada pendekatan dan strategi yang holistik antara pembangunan ekonomi, inklusi sosial, dan keberlanjutan lingkungan dengan tetap mengedepankan pada karakteristik dan prioritas tiap-tiap negara (Panuluh dan Fitri, 2016).

Konsep SDGs ini diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015, *Millennium Development Goals* (MDGs). Konsep SDGs melanjutkan konsep pembangunan *Millennium Development Goals* (MDGs) dimana konsep itu sudah berakhir pada tahun 2015. Jadi, kerangka pembangunan yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia yang semula menggunakan konsep MGDs sekarang diganti SDGs. Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu, pertama indikator yang melekat pembangunan manusia (*Human Development*), di antaranya pendidikan, kesehatan. Indikator kedua yang melekat pada lingkungan kecilnya (*Social Economic Development*), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan, serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, indikator ketiga melekat pada lingkungan yang lebih besar (*Environmental Development*), berupa ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik (Wahyuningsih, 2018).

*Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai agenda pengganti *Millennium Development Goals* (MDGs) dan mulai berjalan dari tahun 2015 hingga 2030, yang



memuat 17 tujuan dengan 169 target yang tidak bisa dipisahkan, saling terhubung dan terintegrasi satu sama lain guna mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Dengan adanya 17 tujuan ini diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Salah satu tujuan yang belum tercapai yaitu kemiskinan, yang mana persoalan kemiskinan ini harus dipahami dan dimengerti, sehingga harus ditangani dalam konteks global.

Kemiskinan adalah suatu kondisi kehidupan dimana terdapat sejumlah penduduk tidak mampu mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok (*basic needs*) minimum dan mereka hidup di bawah tingkat kebutuhan minimum tersebut. Sementara itu BPS dalam mengukur kemiskinan juga berdasarkan pada kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Nilai kebutuhan dasar minimum tersebut digambarkan dengan garis kemiskinan (Suryandari, 2018).

Kemiskinan (*poverty*) masih menjadi salah satu fenomena sosial yang selalu ada di setiap negara berkembang, termasuk Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang memiliki permasalahan kemiskinan. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (Nasir et al, 2008).

Permasalahan kemiskinan bukan hanya sebatas masalah nasional saja, tetapi juga sudah merambah ke setiap daerah di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu wilayah di Indonesia yang penduduk miskinnya masih cukup tinggi adalah Sumatera Selatan. Sumatera Selatan memiliki masalah dengan tingginya jumlah penduduk yang akan membawa kekhawatiran tersendiri diantaranya akan banyak pengangguran yang mencerminkan banyaknya penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan karena tidak mempunyai penghasilan untuk membiayai kebutuhan hidup. Pemerintah daerah sendiri selalu berupaya untuk mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Sumatera Selatan dengan memperbaiki kualitas sumber daya manusia.

Tabel 1.1. Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase Penduduk Miskin (%)
2014	1.085,800	13,62
2015	1.112,530	13,77
2016	1.096.500	13,39
2017	1.086,760	13,10
2018	1.076,400	12,43

Sumber : Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan

Pada Tabel 1.1. di atas, persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan dalam 5 tahun terakhir yaitu pada periode 2014 hingga tahun 2018 cenderung mengalami penurunan. Pada periode tahun 2014 persentase penduduk miskin sebanyak 13,62 persen dan tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 12,43 persen, dari periode tahun tersebut Provinsi Sumatera Selatan telah mengalami penurunan sebanyak 1,19 persen. Penurunan angka kemiskinan di Sumatera Selatan ini didorong oleh beberapa faktor mulai dari meningkatnya akses pendidikan, perkembangan pembangunan ekonomi serta pembangunan infrastruktur yang mulai bisa beroperasi. Sumatera Selatan masih mengalami kemiskinan meskipun memiliki kekayaan sumber daya yang dapat menunjang kebijakan penurunan angka kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul analisis faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kemiskinan dalam mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Sumatera Selatan.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Berapa persentase penduduk miskin saat selesainya periode *Sustainable Development Goals* (SGDs) tahun 2030 di Sumatera Selatan
2. Bagaimana analisis faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kemiskinan di Sumatera Selatan
3. Bagaimana upaya menurunkan tingkat kemiskinan dalam mendukung target *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Sumatera Selatan

### 1.3. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui berapa persentase penduduk miskin pada saat selesainya periode *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Sumatera Selatan
2. Mengidentifikasi faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kemiskinan di Sumatera Selatan
3. Merumuskan strategi dalam upaya mempercepat penurunan kemiskinan dalam mendukung target *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Sumatera Selatan

Berdasarkan tujuan yang ada, diharapkan kegunaan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagi penulis, diharapkan dapat berguna untuk menambah informasi dan wawasan tentang keadaan penduduk miskin di Sumatera Selatan.
2. Diharapkan penelitian ini berguna dan bermanfaat sebagai bahan literatur dan referensi bagi pembaca dan penelitian sejenis di masa yang akan datang.

## **BAB 2**

### **KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **2.1. Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1. Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs)**

*Sustainable Development Goals* (SDGs), yaitu sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan perundingan negara-negara di dunia. Konsep SDGs diperlukan sebagai kerangka pembangunan baru yang mengakomodasi semua perubahan yang terjadi pasca 2015-MDGs. Terutama yang berkaitan dengan perubahan situasi dunia sejak tahun 2000.

SDGs memiliki 5 pondasi yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan yang ingin mencapai tiga tujuan mulia di tahun 2030 berupa mengakhiri kemiskinan, mencapai kesetaraan dan mengatasi perubahan iklim. Untuk mencapai tiga tujuan mulia tersebut, maka disusunlah 17 Tujuan Global berikut ini:

1. Tanpa kemiskinan. Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia.
2. Tanpa kelaparan. Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan.
3. Kesehatan yang baik dan kesejahteraan. Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur.
4. Pendidikan berkualitas. Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang.
5. Kesetaraan gender. Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan
6. Air bersih dan sanitasi. Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang.
7. Energi bersih dan terjangkau. Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang.
8. Pertumbuhan ekonomi dan pekerjaan yang layak. Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif dan layak.

9. Industri, inovasi dan infrastruktur. Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industri yang berkelanjutan serta mendorong inovasi.
10. Mengurangi kesenjangan. Mengurangi ketidaksetaraan baik di dalam sebuah negara maupun di antara negara-negara di dunia.
11. Keberlanjutan kota dan komunitas. Membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan.
12. Konsumsi dan produksi bertanggung jawab. Menjamin keberlangsungan konsumsi dan pola produksi.
13. Aksi terhadap iklim. Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya.
14. Kehidupan bawah laut. Melestarikan dan menjaga keberlangsungan laut dan kehidupan sumber daya laut untuk perkembangan yang berkelanjutan.
15. Kehidupan di darat. Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah.
16. Institusi peradilan yang kuan dan kedamaian. Meningkatkan perdamaian termasuk masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses untuk keadilan bagi semua orang termasuk lembaga dan bertanggung jawab untuk seluruh kalangan.
17. Kemitraan untuk mencapai tujuan. Memperkuat implementasi dan menghidupkan kembali kemitraan global untuk pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan pertama dari *Sustainable Development Goals* adalah tanpa kemiskinan (*no poverty*) yaitu mengakhiri kemiskinan dimanapun dan dalam semua bentuk. Adapun target-target yang memuat tujuan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Menghapus kemiskinan ekstrim (penduduk di bawah garis kemiskinan) dengan daya beli kurang dari \$1,25 PPP (Purchasing Power Parity) atau sekitar Rp. 7.800, per hari.
2. Mengurangi setidaknya separuh dari jumlah penduduk miskin berdasarkan definisi nasional.

3. Di tingkat nasional mengimplementasikan sistem dan ukuran perlindungan sosial yang tepat bagi semua level masyarakat.
4. Memastikan semua penduduk, terutama penduduk miskin dan rentan mendapat hak setara mengakses sumber ekonomi. Kepemilikan dan akses pada lahan.
5. Membangun yang dibutuhkan dan layanan keuangan termasuk keuangan mikro, daya tahan dan kesiapan masyarakat miskin dan kelompok rentan menghadapi perubahan iklim, krisis lingkungan, ekonomi, sosial dan bencana.

### **2.1.2. Teori Kemiskinan**

Definisi mengenai kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi dan pengukuran terhadap sekelompok masyarakat/golongan yang selanjutnya disebut miskin (Nugroho, 1995). Pada umumnya, setiap negara termasuk negara Indonesia memiliki sendiri definisi seseorang atau suatu masyarakat dikategorikan miskin. Hal ini dikarenakan kondisi yang disebut miskin bersifat relatif untuk setiap negara misalnya kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial. Setiap definisi ditentukan menurut kriteria atau ukuran-ukuran berdasarkan kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau kemampuan konsumsi rata-rata, status pendidikan, dan juga kondisi kesehatan.

Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2004, kemiskinan adalah kondisi sosial ekonomi seseorang atau kelompok yang tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang martabat. Kebutuhan dasar yang menjadi hak seseorang atau sekelompok orang meliputi kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertahanan, sumber daya alam, lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman dari tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kehidupan sosial dan politik.

Kriteria pengukuran kemiskinan menurut BKKBN secara khusus mencatat dan melakukan pemantauan keluarga di Indonesia dan hasilnya dikumpulkan dalam satu pangkalan data yang bersifat nasional. Pada 1985 BKKBN mengembangkan sistem pendataannya dan melakukan survei perencanaan keluarga nasional. Pada 1994 BKKBN menambah dua bagian dalam surveinya, yaitu ukuran kesejahteraan keluarga dan karakteristik demografi keluarga. Bagian kesejahteraan keluarga

digunakan untuk penargetan keluarga miskin yang dibagi dalam lima kategori kesejahteraan, yaitu keluarga prasejahtera (Pra-KS), keluarga sejahtera 1 (KS1), keluarga sejahtera 2 (KS2), keluarga sejahtera 3 (KS3), dan keluarga sejahtera 3 plus (KS3 Plus). Adapun dalam penentuan kesejahteraan keluarga, BKKBN menggunakan 23 indikator, yaitu:

1. Anggota keluarga belum melaksanakan ibadah menurut agamanya
2. Seluruh anggota keluarga tidak dapat makan minimal dua kali sehari
3. Seluruh anggota keluarga tidak memiliki pakaian berbeda untuk di rumah, bekerja, sekolah, dan bepergian
4. Bagian terluas dari lantai rumah adalah tanah
5. Bila anak sakit, tidak dibawa ke sarana kesehatan
6. Anggota keluarga tidak melaksanakan ibadah agamanya secara teratur
7. Keluarga tidak makan daging/ikan/telur minimal sekali seminggu
8. Setiap anggota keluarga tidak memperoleh satu stel pakaian baru dalam setahun
9. Tidak terpenuhinya luas lantai rumah minimal delapan meter persegi per penghuni
10. Ada anggota keluarga yang sakit dalam tiga bulan terakhir
11. Tidak ada anggota keluarga berumur 15 tahun ke atas yang berpenghasilan tetap
12. Ada anggota keluarga berumur 10–60 tahun yang tidak bisa baca-tulis
13. Ada anak berumur 5–15 tahun yang tidak bersekolah
14. Jika keluarga telah memiliki dua anak atau lebih, tidak memakai kontrasepsi
15. Keluarga dapat meningkatkan pengetahuan agamanya
16. Sebagian penghasilan keluarga ditabung
17. Keluarga minimal dapat makan bersama sekali dalam sehari dan saling berkomunikasi
18. Keluarga ikut berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat
19. Keluarga melakukan rekreasi di luar rumah minimal sekali sebulan
20. Keluarga dapat mengakses berita dari surat kabar, radio, televisi ataupun majalah
21. Anggota keluarga dapat menggunakan fasilitas transportasi lokal
22. Keluarga berkontribusi secara teratur dalam aktivitas sosial; dan
23. Minimal satu anggota keluarga aktif dalam pengelolaan lembaga lokal

Sebuah keluarga dapat dikategorikan sebagai Pra-KS bila belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya (*basic needs*) secara minimal atau belum bisa memenuhi indikator 1 hingga 5, KS1 bila memenuhi indikator 1 hingga 5, KS2 bila memenuhi indikator 1 hingga 14, KS3 bila memenuhi indikator 1 hingga 21, dan dikategorikan KS3 Plus bila memenuhi seluruh indikator 1 hingga 23.

Adapun 14 indikator untuk menentukan rumah tangga miskin menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu sebagai berikut:

1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup>.
2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/ kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa di plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah orang lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging /susu/ayam dalam satu kali seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyaksatu/dua kali dalam sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnyadengan pendapatan di bawah Rp. 600.000, per bulan.
13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/ tamat SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijualdengan minimal Rp. 500.000, seperti sepeda motor kredit/non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Sebuah keluarga dapat dikatakan miskin apabila minimal memenuhi 9 dari 14 indikator di atas.



### 2.1.3. Penyebab Kemiskinan

Penyebab kemiskinan dapat diidentifikasi dan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitas yang rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya juga rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Menurut Spicker (2002), penyebab kemiskinan dapat dibagi menjadi empat yaitu:

1. *Individual Explanation*, kemiskinan yang terjadi karena adanya karakteristik orang miskin itu sendiri, seperti malas, pilihan yang salah, gagal dalam berkerja, cacat bawaan, belum siap memiliki anak, dan sebagainya.
2. *Familiar Explanation*, kemiskinan yang terjadi karena adanya faktor keturunan, dimana antar generasi ke generasi terjadi ketidakberuntungan yang terjadi secara terus menerus, sehingga tidak mampu memperoleh pendidikan yang seharusnya mampu untuk mengeluarkan dari jerat kemiskinan yang ada.
3. *Subcultural Explanation*, kemiskinan yang terjadi karena adanya karakteristik yang terdapat dalam suatu lingkungan, yang berakibat pada moral dari masyarakat di sekitar lingkungan
4. *Structural Explanation*, kemiskinan yang terjadi karena adanya anggapan bahwa kemiskinan sebagai produk dari masyarakat, sehingga menciptakan adanya ketidakseimbangan dan ketimpangan sosial dengan membedakan status dan hak.

### 2.1.4. Pengukuran Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (2010), untuk mengukur kemiskinan menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan konsep pendekatan ini, kemiskinan dapat didefinisikan sebagai

ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Berdasarkan dengan pendekatan tersebut, indikator yang digunakan adalah *Head Count Index* (HCI) yaitu jumlah dan persentase penduduk miskin yang berada dibawah garis kemiskinan (*poverty line*).

Selain *Head Count Index* (P0) terdapat juga indikator lain yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan, yaitu indeks kedalaman kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) yang dirumuskan oleh Foster-GreerThorbecke. Rumus yang digunakan adalah :

$$P_{\alpha} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q \frac{z-y_i}{z} \alpha$$

Keterangan :

Z = Garis kemsikinan

N = Jumlah penduduk

q = Banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan

$y_i$  = Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan ( $i=1, 2, 3, \dots, q$ ),  $y_i < z$

$\alpha = 0$

*Head Count Index* (P0) merupakan jumlah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Semakin kecil angka ini menunjukkan semakin berkurangnya jumlah penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan. Begitupun juga sebaliknya, bila angka P0 besar maka menunjukkan tingginya jumlah persentase penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan.

*Poverty Gap Index* (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Angka ini memperlihatkan jurang (gap) antara pendapatan rata-rata yang diterima penduduk miskin dengan garis kemiskinan. Semakin kecil angka ini menunjukkan secara rata-rata pendapatan penduduk miskin sudah semakin mendekati garis kemiskinan. Semakin tinggi angka ini maka semakin besar kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk.

*Poverty Severity Index* (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Angka ini memperlihatkan sensitivitas distribusi pendapatan antar kelompok miskin. Semakin kecil angka ini melihatkan

distribusi pendapatan diantara penduduk miskin yang semakin lama semakin merata.

Kemiskinan juga dapat diukur dengan cara membandingkan tingkat konsumsi seseorang dengan garis kemiskinan atau dengan jumlah rupiah yang dikeluarkan untuk konsumsi orang dalam perbulannya. Sedangkan penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Secara umum ada dua macam ukuran kemiskinan yang biasa digunakan yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif (Arsyad, 2016).

#### 1) Kemiskinan Absolut

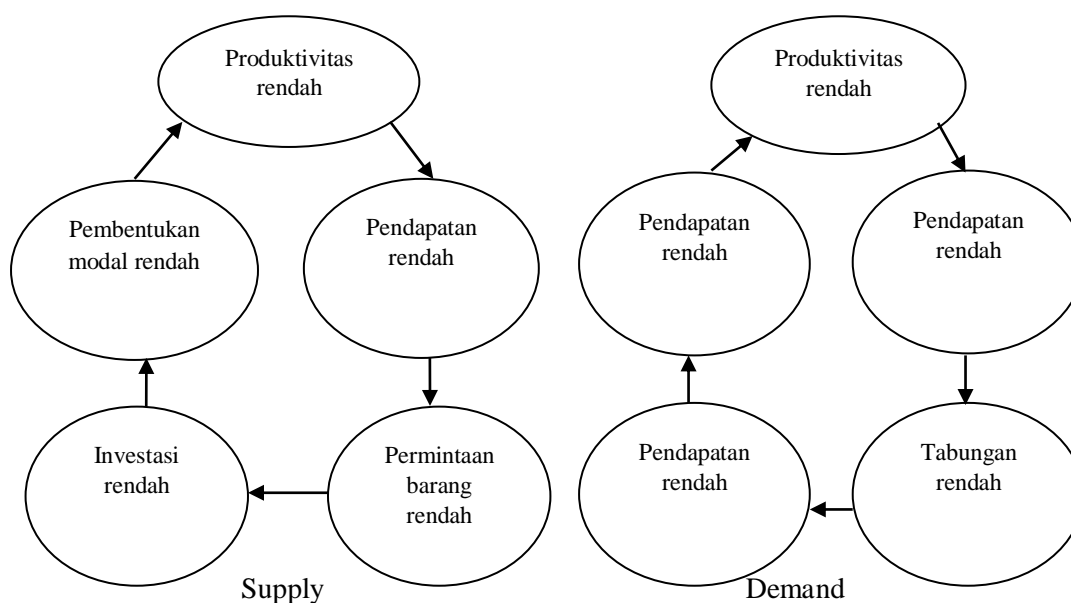
Konsep kemiskinan dapat dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan. Perkiraan kebutuhan hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup secara layak. Bila pendapatan tidak mencapai kebutuhan minimum, maka orang dapat dikatakan miskin. Dengan demikian, Kemiskinan dapat diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan tingkat pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya.

#### 2) Kemiskinan Relatif

Beberapa pakar berpendapat bahwa meskipun pendapatan seseorang telah mencapai kebutuhan dasar minimum, namun ternyata pendapatan orang tersebut masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan masyarakat disekitarnya, maka dapat dikatakan orang tersebut masih berada dalam kategori miskin. Ini terjadi karena kemiskinan lebih banyak ditentukan oleh keadaan sekitarnya, dari lingkungan orang yang bersangkutan.

### **2.1.5. Lingkaran Kemiskinan**

Teori Nurkse tentang lingkaran kemiskinan yang berpendapat bahwa kemiskinan bukan hanya disebabkan oleh ketiadaan pembangunan masa lalu, tetapi juga akan menghadirkan hambatan kepada pembangunan di masa yang mendatang. Sehubungan dengan itu Nurkse mengatakan bahwa "Suatu negara jadi miskin karena ia merupakan negara miskin. Adapun dua jenis lingkaran kemiskinan yang dimaksud Nurkse adalah lingkaran dari segi penawaran modal dan segi dari permintaan modal seperti pada gambar di bawah ini:



Sumber : Sukirno, 2006

Gambar 2.1. Lingkaran Kemiskinan Permintaan dan Penawaran

Menurut Nurkse lingkaran kemiskinan penawaran (*supply*) dimana pada tingkat pendapatan masyarakat yang rendah diakibatkan oleh tingkat produktivitas yang rendah sehingga kemampuan masyarakat untuk menabung rendah, tingkat pembentukan modal (investasi) yang rendah menyebabkan kekurangan modal, sehingga produktivitasnya rendah. Sedangkan pada lingkaran kemiskinan permintaan (*demand*) di negara miskin kemampuan untuk menanam modal sangat rendah, hal ini dikarenakan luas pasar untuk berbagai jenis barang terbatas yang disebabkan oleh pendapatan masyarakat yang rendah. Rendahnya pendapatan masyarakat ini dikarenakan tingkat produktivitasnya yang rendah, sebagai wujud dari tingkat pembentukan modal yang terbatas di masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas disebabkan kurangnya perangsang untuk menanamkan modal dan seterusnya (Sukirno, 2006).

#### 2.1.6. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan

Faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kemiskinan yaitu sebagai berikut:

## 1. Pengangguran

Pengangguran adalah penduduk yang tidak memiliki pekerjaan. Bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi pengangguran dapat menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja.

Pengangguran dapat diartikan sebagai angkatan kerja yang belum bekerja atau tidak bekerja secara optimal. Kategori orang yang menganggur biasanya adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan pada usia kerja dan masa kerjanya (Afinie, 2019). Berdasarkan dari pengertian diatas, maka pengangguran dapat dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

- a. Pengangguran Terselubung (*Disguised Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena suatu alasan tertentu.
- b. Menganggur (*Under Unemployment*) adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena tidak ada lapangan pekerjaan, biasanya tenaga kerja setengah menganggur ini merupakan tenaga kerja yang bekerja kurang dari 35 jam selama seminggu.
- c. Pengangguran Terbuka (*Open Unemployment*) adalah tenaga kerja yang sungguh-sungguh tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran jenis ini cukup banyak karena memang belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal.

## 2. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Sektor Pertanian

PDRB adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode (Sasana, 2006). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimiliki. Ada dua cara dalam penyajian PDRB, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

- a. PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan bahwa nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, dan struktur ekonomi suatu daerah.

- b. PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan bahwa nilai tambah barang dan jasa tersebut dapat dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun.

Untuk menyusun PDRB digunakan dua pendekatan yaitu pendekatan lapangan usaha dan pendekatan pengeluaran. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

### 3. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani ( $I_t$ ) dengan indeks harga yang dibayar petani ( $I_b$ ) yang dinyatakan dalam bentuk persentase.

$$NTP = \frac{I_t}{I_b} \times 100$$

Keterangan :

NTP = Nilai tukar petani

$I_t$  = Indeks harga yang diterima petani

$I_b$  = Indeks harga yang dibayar petani

Terdapat tiga pengertian dari angka nilai tukar petani yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- $NTP > 100$ , berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya.
- $NTP = 100$ , berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya.
- $NTP < 100$ , berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

#### 4. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah merupakan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah ini dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.

$$RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$$

Keterangan :

RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas

$X_i$  = Lama sekolah penduduk ke- $i$  yang berusia 25 tahun

$n$  = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas

Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 3 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 3 tahun dengan total dengan total lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

#### 5. Upah Minimum Provinsi (UMP)

Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan/atau Kabupaten/Kota ditetapkan oleh pihak berwajib yaitu Gubernur. Upah minimum Provinsi dapat dihitung berdasarkan formula perhitungan upah minimum. Dalam hal ini Gubernur menetapkan Upah minimum Provinsi dengan memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan provinsi. Rekomendasi dewan pengupahan provinsi ini didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Upah yang diterima pekerja dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Upah Nominal, yaitu sejumlah upah yang dinyatakan dalam bentuk uang yang diterima secara rutin oleh pekerja.
- b. Upah Riil, yaitu kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan oleh barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran tersebut.

#### 6. PDRB Total

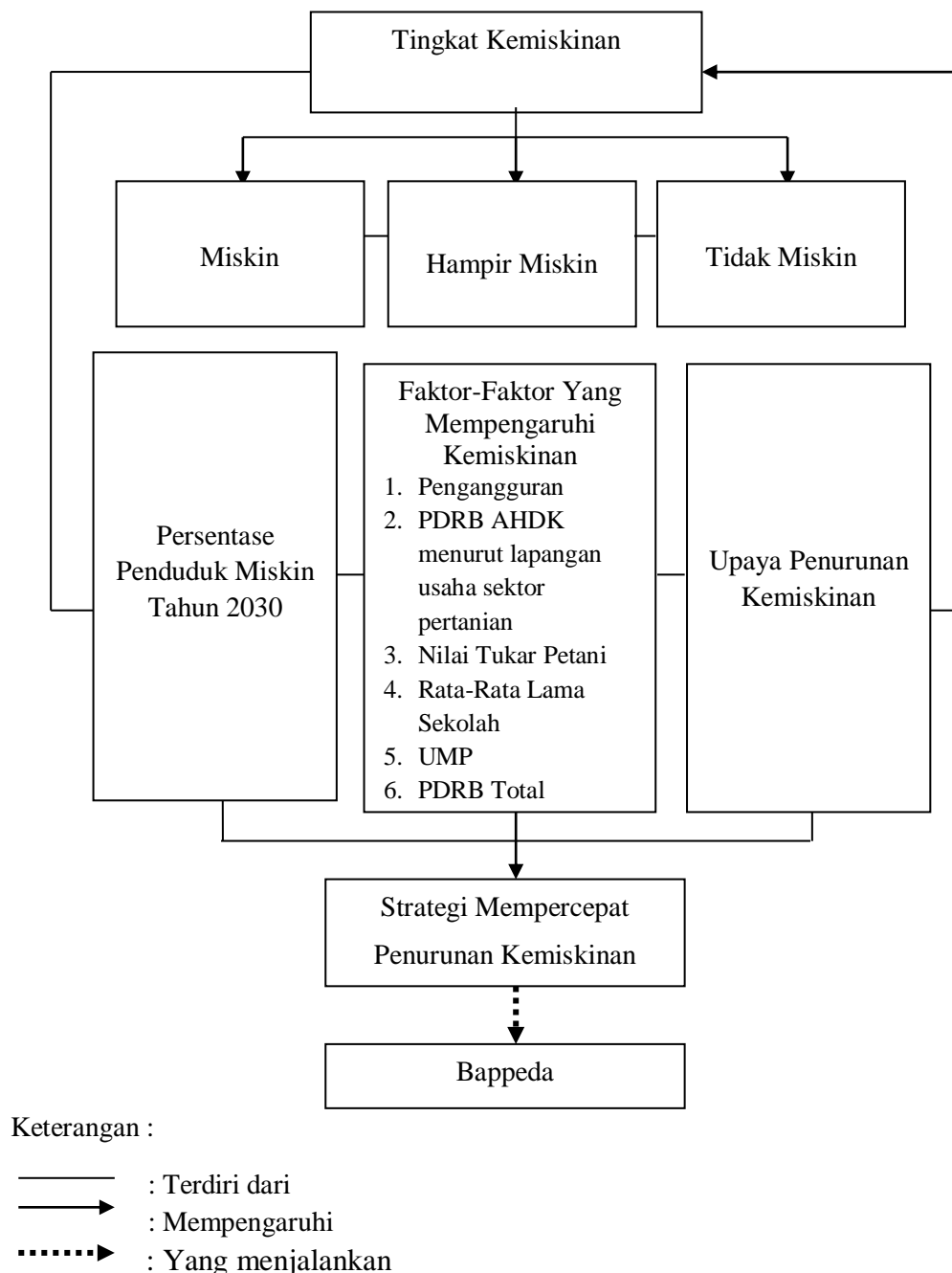
Produk domestik regional bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan dari suatu wilayah untuk menghasilkan nilai tambah (output) pada waktu tertentu. PDRB menggunakan dua pendekatan yaitu, produksi dan penggunaan. Kedua

pendekatan tersebut menggunakan komposisi data nilai tambah yang dirinci berdasarkan sumber kegiatan ekonomi dan berdasarkan komponen penggunaannya. PDRB dapat digunakan untuk mengetahui perubahan harga dengan menghitung deflator PDRB (perubahan indeks implisit). Indeks harga implisit merupakan rasio antara PDRB menurut harga berlaku dan PDRB menurut harga konstan. Menghitung PDRB bertujuan untuk membantu membuat kebijakan daerah atau perencanaan, evaluasi hasil pembangunan, memberikan informasi yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian.



## 2.2. Model Pendekatan

Model pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah model pendekatan diagramatis yang dapat dilihat pada Gambar 2.2.



Gambar 2.2. Model Pendekatan Penelitian Secara Diagramatis

### 2.3. Hipotesis

Berdasarkan penelitian Cahaya (2018), tentang peramalan persentase penduduk miskin tahun 2018 di kota Pematang Siantar, menyatakan bahwa berdasarkan hasil yang didapat bahwa peramalan persentase penduduk miskin di kota Pematang Siantar menurun pada tahun 2018.

Dalam penelitian Jundi (2014), mengatakan bahwa dalam usaha menurunkan kemiskinan yang terjadi perlu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas agar dapat dirasakan oleh seluruh lapisan penduduk. Selain itu, faktor sosial ekonomi sangat berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah kemiskinan dimana setiap tahunnya dapat mengalami peningkatan jumlah penduduk sehingga kesempatan lapangan pekerjaan yang tersedia tidak mampu untuk menyerap tenaga kerja yang melebihi dari permintaan tenaga kerja. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Diduga peramalan persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan menurun pada tahun 2030.
2. Diduga indikator yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan adalah faktor sosial ekonomi.

### 2.4. Batasan Operasional

Adapun batasan-batasan operasional yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperjelas lingkup pada penelitian adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data dari tahun 1999 hingga 2018.
3. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
4. Garis kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencakup pada suatu negara.
5. Konsep pengukuran kemiskinan terdiri dari *Head Count Index (P0)*, *Poverty Gap Index (P1)* dan *Poverty Severity Index (P2)*.
6. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan adalah pengangguran, produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan menurut lapangan

usaha sektor pertanian, nilai tukar petani, rata-rata lama sekolah, upah minimum provinsi (UMP) dan PDRB total.

7. Pengangguran adalah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan akan tetapi belum memperolehnya.
8. Produk domestik regional bruto (PDRB) menggambarkan kemampuan dari suatu wilayah untuk menghasilkan nilai tambah (output) pada waktu tertentu.
9. PDRB menurut lapangan usaha adalah penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya.
10. PDRB atas dasar harga konstan adalah penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu.
11. Nilai tukar petani merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB).
12. Rata-rata lama sekolah digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.
13. UMP adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai atau buruh di dalam lingkungan kerjanya.
14. Sustainable Development Goals adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup baik dari generasi sekarang maupun yang akan datang.
15. Kategori miskin/Pra KS yaitu bila belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya atau belum bisa memenuhi indikator 1-5 seperti tidak makan minimal dua kali dalam sehari.
16. Kategori hampir miskin/KS1 yaitu mampu memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat memenuhi indikator 1-5.
17. Kategori tidak miskin/KS2 yaitu mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan dapat memenuhi 1-14.
18. Forecasting adalah kegiatan memprediksikan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang dengan waktu yang relatif lama.
19. Regresi linear berganda adalah model regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas.

20. Uji asumsi klasik adalah analisis yang digunakan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi terdapat masalah-masalah asumsi klasik.
21. Analisis SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*).

## **BAB 3**

### **PELAKSANAAN PENELITIAN**

#### **3.1. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan, dengan mengambil data dan informasi dari instansi terkait. Penentuan lokasi dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan bahwa masih tingginya tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan. Pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Januari-Maret 2020.

#### **3.2. Metode Penelitian**

Metode penelitian sangat dibutuhkan untuk mengukur keberhasilan dari suatu penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif yang disesuaikan dengan variabel penelitian untuk memusatkan pada masalah-masalah yang terjadi dengan bentuk hasil berupa angka, tabel, grafik, dan diagram.

#### **3.3. Metode Pengumpulan Data**

Dalam suatu penelitian pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting karena data yang dikumpulkan digunakan untuk pemecahan masalah yang sedang diteliti atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang sudah ada dan berhubungan langsung dengan fokus penelitian yang diperoleh dari jurnal, studi pustaka, buku, serta dari data lembaga yang berkaitan langsung pada penelitian ini, seperti jurnal, Badan Pusat Statistik (BPS) dan instansi terkait sesuai dengan penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini mulai dari tahun 1999-2018. Adapun variabel data yang digunakan yaitu:

- a. Data Pengangguran Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 1999-2018.
- b. Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Sektor Pertanian Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 1999-2018.
- c. Data Nilai Tukar Petani Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 1999-2018.

- d. Data Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 1999-2018.
- e. Data Upah Minimum Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 1999-2018.
- f. Data PDRB Total Provinsi Sumatera Selatan sejak tahun 1999-2018.

### 3.4. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari berbagai lembaga terkait akan dikumpulkan dan diolah secara tabulasi dan hasilnya dituliskan dalam bentuk berupa angka, tabel, maupun grafik, kemudian data tersebut dianalisis dan diinterpretasikan dengan cara memaparkan hasil yang telah diperoleh dalam bentuk uraian yang sistematis pada pembahasan.

Untuk menjawab tujuan pertama yaitu mengetahui berapa persentase penduduk miskin pada tahun 2030, maka digunakan metode peramalan *time series* jenis *forecast* berdasarkan analisis statistika, dengan menggunakan regresi. Regresi menunjukkan hubungan antara variabel yang satu dengan variabel lain. Dalam hal ini digunakan cara menghitung dalam bentuk persamaan *Trend*. *Trend* adalah garis naik atau turun. Adapun bentuk persamaan garis lurus dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = a + bX$$

Y = Persentase penduduk miskin

a = Intercept Y, yakni nilai Y apabila X = 0

b = Lereng garis *Trend*

Untuk menjawab tujuan kedua yaitu menganalisis faktor sosial ekonomi yang memengaruhi kemiskinan tersebut maka digunakan analisis regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + \beta_6 X_6 \dots + u$$

Keterangan :

Y = Persentase Penduduk Miskin

A = Intersep

$\beta_1 - \beta_6$  = Koefisien

X<sub>1</sub> = Pengangguran

X<sub>2</sub> = PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha Sektor Pertanian

X<sub>3</sub> = Nilai Tukar Petani

X<sub>4</sub> = Rata-Rata Lama Sekolah

$X_5$  = Upah Minimum Provinsi  
 $X_6$  = PDRB Total  
 $U$  = Kesalahan pengganggu

Untuk mengetahui apakah model regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini memenuhi asumsi klasik atau tidak maka dilakukan uji asumsi klasik dengan menggunakan uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, uji normalitas dan uji autokorelasi sebagai berikut :

#### 1. Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas adalah uji yang dilakukan untuk memastikan apakah didalam sebuah model regresi ada interkorelasi atau kolinieritas antar variabel bebas. Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independent (bebas). Model regresi yang bebas multikolinieritas adalah memiliki nilai VIF lebih kecil dari 10 mempunyai angka mendekati 1. Untuk menguji hipotesis ini menggunakan perhitungan dengan program *spss for windows*.

#### 2. Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varian residual dari pengamatan satu ke pengamatan lain, maka disebut heteroskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah homokedastisitas atau tidak terjadi atau tidak adanya heteroskedastisitas .

#### 3. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Cara untuk mengetahui normalitas ialah dengan cara melihat *normal probability plot* yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk suatu garis lurus diagonal dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Untuk menguji hipotesis ini digunakan perhitungan dengan program komputansi *SPSS for windows*.

Jika syarat asumsi telah terpenuhi terhadap persamaan regresi maka akan dilakukan uji selanjutnya terhadap model regresi dan hipotesis penelitian melalui koefisien determinasi ( $R^2$ ), nilai statistik uji F, dan nilai Uji t. Untuk melihat seberapa besar variabel bebas terhadap variabel terikatnya dapat menggunakan perhitungan koefisien determinasi :

$$R^2 = \frac{\text{jumlahkuadratregresi}}{\text{jumlahkuadrattotal}}$$

Keterangan :

$R^2$  = koefisien determinasi

Nilai  $R^2$  berkisar 0-1 jika  $R^2$  yang diperoleh mendekati 1 maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebaliknya jika  $R^2$  mendekati 0 maka semakin lemah variabel-variabel bebas menerangkan variabel terikat. Perhitungan dengan menggunakan program komputansi *SPSS for Windows*.

Untuk menjelaskan mengenai semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model memiliki pengaruh secara bersamaan terhadap variabel terikat dilakukan uji F. Rumus uji F sebagai berikut :

$$F \text{ hitung} = \frac{\text{jumlahkuadratregresi}/(k-1)}{\text{jumlahkuadratsisa}/(n-1)}$$

Keterangan :

K = jumlah parameter (variabel bebas)

N = jumlah pengamatan (contoh)

Hipotesis :

$H_0 : F\text{-sig} \leq \alpha (0,05)$

$H_a : F\text{-sig} > \alpha (0,05)$

Kaidah keputusan :

- 1)  $F\text{-sig} \leq \alpha (0,05)$ , maka terima  $H_0$ , artinya secara bersama-sama variabel bebas tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.
- 2)  $F\text{-sig} > \alpha (0,05)$ , maka tolak  $H_0$ , artinya secara bersama-sama variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel terikat. Untuk menguji hipotesis ini digunakan perhitungan dengan program komputansi *SPSS for windows*.

Untuk menjelaskan pengaruh koefisien regresi secara parsial maka masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, dilakukan dengan uji t (uji



parsial). Untuk menentukan t-tabel, taraf signifikan yang digunakan sebesar 5 persen dengan derajat kebebasan  $df=(n-k-1)$  dimana k merupakan jumlah variabel bebas. Adapun rumus dari uji t ini adalah :

$$T \text{ hitung} = \frac{b_i}{se(b_i)}$$

Keterangan :

$Se(b_i) = \sqrt{varian(\beta_i)}$

$b_i$  = koefisien regresi parsial untuk variabel ke-i

$Se(b_i)$  = standar deviasi dari koefisien regresi variabel bebas ke-1 yang diduga

Hipotesis :

$H_0 : T\text{-sig} \leq \alpha (0,05)$

$H_a : T\text{-sig} > \alpha (0,05)$

Kaidah keputusan :

- 1)  $T\text{-sig} \leq \alpha (0,05)$ , maka terima  $H_0$ , artinya secara individu variabel bebas berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.
- 2)  $T\text{-sig} > \alpha (0,05)$ , maka tolak  $H_0$ , artinya secara individu variabel bebas tidak berpengaruh nyata terhadap variabel terikat.

#### 4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui adakah korelasi variabel yang ada di dalam model prediksi dengan perubahan waktu. Masalah asumsi uji autokorelasi ini dapat dideteksi dengan menggunakan berbagai jenis analisis, salahsatunya dengan menggunakan uji Durbin Watson. Uji Durbin Watson akan menghasilkan nilai Durbin Watson (DW) yang nantinya akan dibandingkan dengan (2) nilai Durnin Watson tabel, yaitu Durbin Uper (DU) dan Durbin Lower (DL). Dikatakan tidak terdapat autokorelasi jika nilai  $DW > DU$  dan  $(4-DW) > DU$ .

Sedangkan untuk menjawab tujuan ketiga yaitu bagaimana upaya penurunan kemiskinan dalam mencapai target *Sustainable Development Goals*(SDGs), maka digunakan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah identifikasi sebagai faktor untuk merumuskan strategi penurunan kemiskinan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strenght*) dan peluang (*opportunities*), namun secara kebersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weakness*) dan ancaman (*threats*). Secara garis besar terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi analisis SWOT, yaitu sebagai berikut :

Tabel 3.1. Faktor Strategi Internal dan Eksternal

Internal \ Eksternal	Strengths	Weaknesses
<b>Opportunities</b>	<b>Strategi SO:</b> Mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk mengambil manfaat dari peluang (O) yang ada	<b>Strategi WO:</b> Mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan peluang (O) untuk mengatasi kelemahan (W) yang ada
<b>Threats</b>	<b>Strategi ST:</b> Mengembangkan suatu strategi dalam memanfaatkan kekuatan (S) untuk menghindari ancaman (T)	<b>Strategi WT:</b> Mengembangkan suatu strategi dalam mengurangi kelemahan (W) dan menghindari ancaman (T)

Faktor strategis adalah faktor dominan dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang memberikan pengaruh terhadap kondisi dan situasi yang ada dan memberikan keuntungan bila dilakukan tindakan positif. Menganalisis lingkungan internal (IFAS) untuk mengetahui berbagai kemungkinan kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*). Menganalisis lingkungan eksternal (EFAS) untuk mengetahui berbagai kemungkinan peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*).

## BAB 4

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Keadaan Umum

##### 4.1.1. Letak dan Batas Wilayah Administrasi

Sumatera Selatan merupakan dataran rendah yang memiliki ketinggian dengan rata-rata +79 meter di atas permukaan laut. Luas wilayah Sumatera Selatan adalah berupa daratan seluas 87.421,24 km<sup>2</sup>. Wilayah administrasi Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 wilayah kabupaten dan 4 kota seperti pada Tabel 4.1. di bawah ini:

Tabel 4.1. Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Kabupaten/Kota	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
<b>Kabupaten</b>		
1. Ogan Komering Ulu	3.747,77	4,29
2. Ogan Komering Ilir	17.086,39	19,54
3. Muara Enim	6.901,36	7,89
4. Lahat	4.297,12	4,29
5. Musi Rawas	6.330,53	7,24
6. Musi Banyuasin	14.530,36	16,62
7. Banyuasin	12.361,43	14,14
8. Oku Selatan	4.544,18	5,20
9. Oku Timur	3.397,10	3,89
10. Ogan Ilir	2.411,24	2,76
11. Empat Lawang	2.312,20	2,64
12. PALI	1.844,71	2,11
13. Musi Rawas Utara	5.836,70	6,68
<b>Kota</b>		
1. Palembang	363,68	0,42
2. Prabumulih	458,11	0,52
3. Pagar Alam	632,80	0,72
4. Lubuk Linggau	365,49	0,42
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>87.421,24</b>	<b>100,00</b>

Sumber : BPS Sumatera Selatan 2018

Wilayah Provinsi Sumatera Selatan bagian utara berbatasan dengan Provinsi Jambi, bagian timur berbatasan dengan Provinsi Bangka Belitung, bagian selatan berbatasan dengan Provinsi Lampung, dan bagian barat berbatasan dengan Provinsi Bengkulu.

#### **4.1.2. Keadaan Topografi**

Provinsi Sumatera selatan secara astrotomis terletak antara  $1^{\circ}$ - $4^{\circ}$  lintang selatan dan antara  $102^{\circ}$ - $106^{\circ}$  bujur timur. Klasifikasi iklim Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan suhu dan kelembaban udara dengan simbol A dan B. Iklim A atau Tropis: suhu rata-rata bulanan tidak kurang dari  $18^{\circ}\text{C}$ , suhu rata-rata tahunan  $20^{\circ}\text{C}$ - $25^{\circ}\text{C}$ , curah hujan rata-rata lebih dari 70 cm pertahun. Iklim B atau iklim Gurun Tropis atau iklim kering dengan ciri : terdapat di daerah gurun dan daerah semiand (steppa), curah hujan terendah kurang dari 25,4 pertahun dan penguapan besar.

Secara topografi, wilayah Sumatera Selatan di Pantai Timur tanahnya terdiri dari rawa-rawa dan payau yang dipengaruhi oleh pasang surut. Pada wilayah barat merupakan dataran rendah yang luas yang pada bagian dalam wilayahnya terdapat gunung dan bukit barisan yang membelah Sumatera Selatan dan merupakan daerah pegunungan dengan ketinggian 900-1,200 meter dari permukaan laut.

Berdasarkan elevasi (ketinggian dari permukaan laut), dataran di Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari:

- a. 0 m – 25 m = 23,5 %
- b. 26 m – 50 m = 17,7 %
- c. 51 m – 100m = 35,3 %
- d. 101 m ke atas = 23,5 %

#### **4.1.3. Jumlah Penduduk**

Sumatera Selatan adalah Provinsi di Indonesia yang terletak di bagian selatan Pulau Sumatera dan beribu kota di Palembang. Penduduk di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2018 sebanyak 8.370.320 jiwa yang dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini:

Tabel 4.2. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis kelamin di Sumatera Selatan

Penduduk	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	4.117.487	49,19
Perempuan	4.252.833	50,81
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>8.370.320</b>	<b>100,00</b>

Sumber : Sumsel dalam angka 2019

Dibandingkan dengan jumlah penduduk Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2010 sebanyak 7.481,604 jiwa, dan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan mengalami pertumbuhan sebesar 0,1 persen. sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2018 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 103,29 jiwa.

Tabel 4.3. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Sumatera Selatan

Kelompok Umur	Jumlah	Persentase (%)
0 – 4	797.318	9,53
5 – 9	801.024	9,57
10 – 14	759.604	9,07
15 – 19	721.902	8,62
20 – 24	694.519	8,30
25 – 29	699.484	8,36
30 – 34	701.267	8,38
35 – 39	663.826	7,93
40 – 44	591.240	7,06
45 – 49	508.913	6,08
50 – 54	429.950	5,14
55 – 59	352.449	4,21
60 – 64	261.491	3,12
65 – 69	169.798	2,03
70 – 74	107.002	1,28
75 +	110.533	1,32
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>8.370,320</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Sumsel dalam angka 2019

Berdasarkan Tabel 4.3. di atas bahwa jumlah penduduk di Sumatera Selatan lebih di dominasi oleh penduduk dalam usia sekitar 5-9 tahun, dengan jumlah 801,024 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk terkecil dalam usia 70-74 tahun dengan jumlah 107,002 jiwa. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk usia sekolah lebih banyak dari pada penduduk yang sudah berusia tidak produktif.

Kepadatan penduduk di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 mencapai 95,75 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan yang terdapat di 17 kabupaten/kota cukup beragam dengan kepadatan penduduk tertinggi terletak di kota Palembang dengan kepadatan sebesar 4.519,05 jiwa/km<sup>2</sup> dan terendah terdapat di kabupaten Musi Rawas Utara dengan kepadatan sebesar 32,53 jiwa/km<sup>2</sup>.

#### **4.1.4. Keadaan Sosial Ekonomi Sektor Pertanian**

Sektor pertanian merupakan salah satu tumpuan lapangan pekerjaan di Sumatera Selatan dibandingkan sektor-sektor yang lainnya dan dapat berperan sebagai penyokong bahan baku sektor industri. Sektor pertanian dipengaruhi secara positif oleh perekonomian nasional, tetapi pertumbuhannya masih lebih rendah dibandingkan dengan sektor lainnya di Sumatera Selatan, namun secara nasional masih bersaing dengan Provinsi lain. Akan tetapi, di tengah unggulnya sektor pertanian ini masih terdapat masyarakat miskin di Sumatera Selatan.

Diketahui bahwa jumlah penduduk miskin di Sumatera Selatan pada tahun 2016 sebanyak 1.096,50 juta jiwa (13,39 persen), pada 2017 sebanyak 1.086,92 juta jiwa (13,10 persen) dan tahun 2018 sebanyak 1.076,40 juta jiwa (12,43 persen). Dapat dilihat bahwa jumlah penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemiskinan di Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut:

##### **1. Pengangguran**

Angkatan kerja merupakan penduduk usia kerja 15 tahun atau lebih yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pada tahun 2018 jumlah angkatan kerja di Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 4.138.957 orang. Perkembangan jumlah angkatan kerja tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2017 yang berjumlah 4.123.669 orang.

Sementara itu, untuk tingkat pengangguran di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 sebesar 4,23 persen. Persentase tersebut mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 4,39 persen. Angka pengangguran ini dihitung dengan cara mendefinisikan menganggur sebagai mencari pekerjaan, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin dalam mendapat pekerjaan dan sudah mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

## 2. PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Sektor Pertanian

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, laju perekonomian Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 mengalami percepatan, yaitu dari 5,51 persen pada tahun 2017 menjadi 6,04 pada tahun 2018. Hal ini disebabkan dari banyaknya lapangan usaha yang mengalami percepatan pertumbuhan salah satunya terdapat pada sektor pertanian. PDRB pada sektor pertanian mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2016 PDRB sektor pertanian sebesar 49.033,651 juta, tahun 2017 sebesar 49.899,152 dan pada tahun 2018 meningkat lagi menjadi 50.587,599 juta.

## 3. Nilai Tukar Petani

Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator untuk menentukan tingkat kesejahteraan petani. Pada tahun 2018 NTP Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan, terlihat dari angka NTP tahun 2017 sebesar 95,03 persen menurun menjadi 93,62 persen di tahun 2018. Oleh karena itu NTP Sumatera Selatan mengalami defisit atau terjadi penurunan daya beli. Penurunan angka NTP umumnya terjadi ketika panen raya, namun naik kembali pada waktu sesudahnya. Jika penurunan angka nilai tukar petani ini secara terus menerus, maka akan mengakibatkan turunnya kesejahteraan bagi para petani.

## 4. Rata-Rata Lama Sekolah

Perbaikan kualitas pendidikan dapat tercermin dari angka rata-rata lama di Provinsi Sumatera Selatan sekolah yang hanya mengalami sedikit. Pada tahun 2017 angka rata-rata lama sekolah sebesar 7,99 lalu mengalami peningkatan sebesar 8,00 di tahun 2018, yang berarti angka tersebut menunjukkan rata-rata lama sekolah dalam menempuh pendidikan selama 8,00 tahun yang artinya menamatkan pendidikan kelas VIII. Meskipun angka rata-rata lama sekolah sedikit peningkatan itu berarti kualitas pendidikan di Sumatera Selatan sedikit demi sedikit mengalami perbaikan.

## 5. Upah Minimum Provinsi

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, upah minimum Provinsi (UMP) Sumatera Selatan tahun 2018 mengalami kenaikan dari yang semula Rp. 2.388.000 di tahun 2017 menjadi Rp. 2.595.994. di tahun 2018. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp. 207.994. Kenaikan upah minimum provinsi di Sumatera Selatan ini akan meningkatkan kesejahteraan bagi para pekerja dan meningkatkan

produktivitas pekerja. Dengan adanya kenaikan UMP ini, Dinas Tenaga Kerja tetap melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap perusahaan dalam melaksanakan pemberian kenaikan UMP bagi para pekerja di Sumatera Selatan.

#### 6. PDRB Total Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha

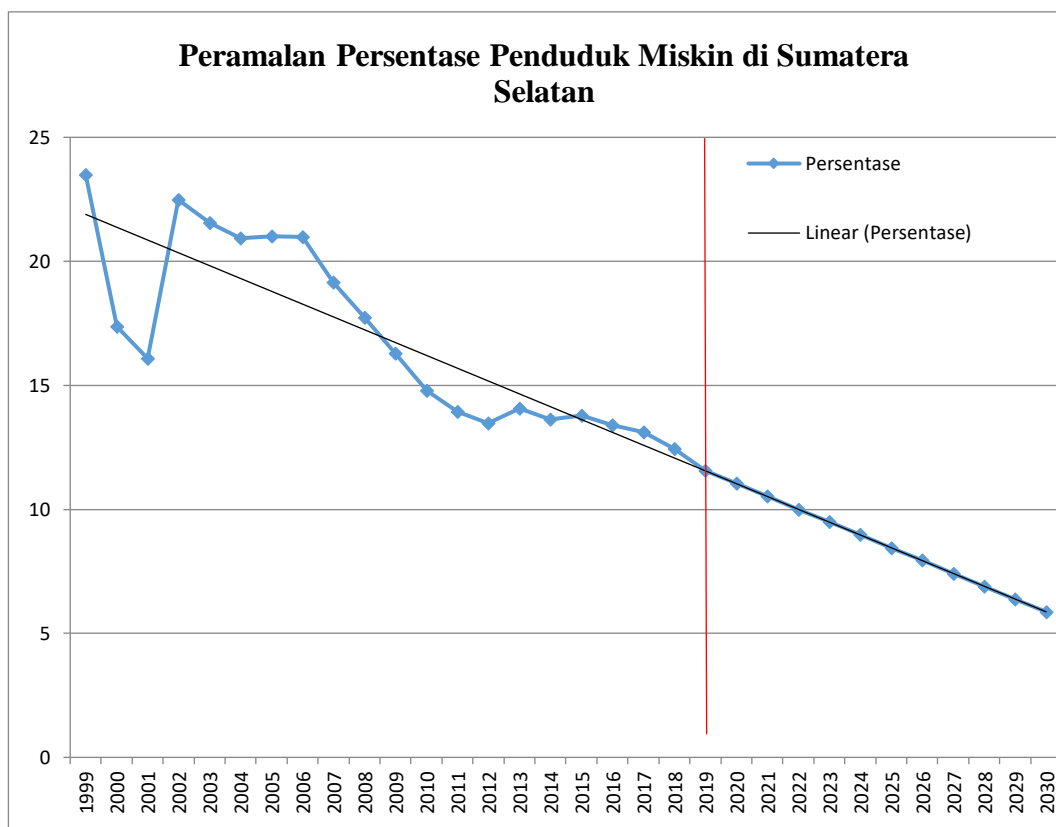
PDRB merupakan salah satu indikator untuk mengukur perkembangan perekonomian pada suatu wilayah. PDRB Sumatera Selatan dalam tiga tahun terakhir terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 PDRB total sebesar 266.853.400 juta, tahun 2017 sebesar 281.471.013 juta, dan tahun 2018 meningkat sebesar 298.568.335 juta. Peningkatan PDRB total atas dasar harga konstan ini dapat dilihat dari banyaknya lapangan usaha yang mengalami percepatan pertumbuhan seperti, sektor pertanian pertambangan dan penggalian, pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, transportasi dan pergudangan, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, jasa perusahaan, jasa pendidikan dan beberapa jasa lainnya.

#### **4.2. Peramalan (*forecasting*) Persentase Penduduk Miskin di Provinsi Sumatera Selatan saat Berakhirnya Periode Sustainable Development Goals (SDGs)**

Peramalan (*forecasting*) merupakan suatu proses untuk memperkirakan atau memprediksi secara sistematis tentang apa yang paling mungkin terjadi di masa yang akan mendatang ini berdasarkan dengan data dan informasi yang akurat, baik di masa lalu maupun sekarang agar dapat meminimalisir kesalahan yang dapat terjadi.

Untuk menjawab tujuan pertama pada penelitian ini yaitu mengetahui berapa persentase penduduk miskin saat selesainya periode *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2030, maka digunakan data sekunder untuk membuat peramalan (*forecasting*) persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan menggunakan SPSS dari tahun 1999 hingga 2030 secara visual dapat dilihat melalui trendline berikut ini:





Gambar 4.1. *Trendline* Persentase Penduduk Miskin Sumatera Selatan

Hasil dari *Trendline* di atas, persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan pada tahun 1999 sebesar 23,49 persen dan di tahun 2001 menurun menjadi 16,07 persen. Tetapi pada tahun 2002 persentase penduduk miskin meningkat drastis menjadi 22,49 persen. Peningkatan persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2002 ini disebabkan oleh masih tingginya PDRB perkapita. Peningkatan persentase penduduk miskin ini bukan hanya terjadi di Provinsi Sumatera Selatan saja, melainkan hampir semua Provinsi mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa selama periode tahun 2002 penerimaan pendapatan Provinsi tidak banyak cukup digunakan untuk program pengentasan kemiskinan. Namun pada tahun-tahun selanjutnya persentase penduduk miskin mulai menurun secara fluktuasi.

Pada tahun 1999 hingga 2018 persentase penduduk miskin terjadi kenaikan dan penurunan, dari yang semula tahun 1999 persentase penduduk miskin sebesar 23,49 persen menurun menjadi 12,43 persen di tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 hingga 2030 terlihat dengan jelas penurunan secara terus menerus persentase penduduk miskin, yaitu pada tahun 2019 persentase penduduk miskin sebesar 12,43

persen lalu menurun pada tahun 2030 menjadi 5,87 persen. Menurunnya persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2030 diduga disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pengangguran dan rata-rata lama sekolah. Pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan diduga karena pada tahun 2030 mendatang pengangguran akan berdampak mengurangi pendapatan masyarakat. Ketika kebutuhan tidak terpenuhi dampaknya mereka akan masuk ke dalam kategori penduduk miskin serta mengakibatkan melonjaknya persentase penduduk miskin. Begitu juga dengan rata-rata lama sekolah yang mempengaruhi kemiskinan diduga karena rendahnya lama sekolah yang akan mengakibatkan seseorang cenderung memiliki keterampilan, wawasan serta pengetahuan yang kurang memadai untuk kehidupannya. Sedangkan dalam dunia kerja, lama sekolah seseorang dapat menjadi modal utama untuk bersaing dalam mendapatkan kesejahteraan nantinya. Oleh karena itu, banyak terjadi pengangguran dan penyebab kemiskinan yang dapat disebabkan oleh rendahnya lama sekolah seseorang. Kedua faktor tersebut diduga dapat menjadi faktor utama yang dapat mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera selatan pada tahun 2030 mendatang.

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan sebelum adanya pandemi Covid-19. Akan tetapi *Trendline* di atas juga dapat terganggu karena adanya pandemi Covid-19 seperti sekarang ini. Dampak dari pandemi ini akan mengakibatkan semakin banyaknya penduduk miskin dan kehilangan pekerjaannya yang membuat mereka tidak memiliki pekerjaan tetap dan tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga mengakibatkan perekonomian Provinsi bahkan di Indonesia juga melemah.

*Trendline* persentase penduduk miskin Provinsi Sumatera Selatan di atas, menunjukkan bahwa persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan mengalami penurunan saat berakhirnya periode *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030 mendatang. Berikut adalah data yang diperoleh dari hasil peramalan (*forecasting*) dan di analisis dari persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut:

Tabel 4.4. Data Peramalan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Selatan

Tahun aktual	Jumlah Penduduk Miskin	Persentase penduduk miskin	Selisih
1999	7.633.800	23.49	0.00
2000	7.757.300	17.37	6.12
2001	6.343.104	16.07	1.30
2002	6.430.188	22.49	-6.42
2003	6.518.791	21.54	0.95
2004	6.628.416	20.92	0.62
2005	6.755.900	21.01	-0.09
2006	6.899.892	20.99	0.02
2007	7.019.964	19.15	1.84
2008	7.121.790	17.73	1.42
2009	7.222.635	16.28	1.45
2010	7.481.604	14.80	1.48
2011	7.598.500	13.95	0.85
2012	7.714.300	13.48	0.47
2013	7.828.700	14.06	-0.58
2014	7.941.500	13.62	0.44
2015	8.052.300	13.77	-0.15
2016	8.160.900	13.39	0.38
2017	8.267.000	13.10	0.29
2018	8.370.300	12.43	0.67
Tahun peramalan			
2019		11.55	0.88
2020		11.04	0.51
2021		10.52	0.52
2022		10.00	0.52
2023		9.49	0.51
2024		8.97	0.52
2025		8.45	0.52
2026		7.94	0.51
2027		7.42	0.52
2028		6.90	0.52
2029		6.38	0.52
2030		5.87	0.51

Sumber: Hasil Regresi Data Sekuder

Dari Tabel 4.6. di atas, terdapat data atau tahun aktual dari persentase penduduk miskin mulai dari 1999 hingga 2018 dengan total data yang digunakan yaitu sebanyak 20 tahun dan data peramalan persentase penduduk miskin mulai dari 2019 hingga 2030 di Provinsi Sumatera Selatan dengan total data yang digunakan sebanyak 12 tahun. Tahun 1999 hingga 2018 persentase penduduk miskin menurun sebesar 11,06 persen. Sedangkan persentase penduduk miskin dari tahun 2018 hingga 2030 menurun sebesar 5,68 persen. Jadi secara keseluruhan penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 1999 hingga tahun 2030 mengalami penurunan sebanyak 17,62 persen di tahun 2030 mendatang. Hal ini diharapkan persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan dapat menurun setiap tahunnya sesuai dengan salah satu tujuan dari *Sustainable Development Goals* (SDGs) tahun 2030 yaitu tanpa kemiskinan (*no poverty*).

#### **4.3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Sumatera Selatan**

Adapun faktor-faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera selatan yaitu pengangguran, PDRB pertanian, NTP (nilai tukar petani), RLS (rata-rata lama sekolah), UMP (upah minimum provinsi) dan PDRB total. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan pada penelitian ini maka digunakan regresi linear berganda.

Penggunaan analisis dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda yang dilakukan untuk mengetahui hubungan secara linear dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Atau untuk mengetahui pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara simultan maupun parsial, serta menguji hipotesis penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut adalah hasil dari analisis regresi linear berganda.

Tabel 4.5. Hasil Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Sumatera Selatan

Variabel	B	Std Error	T	Sig.	R square	F	Keterangan
(Constant)	54,781	11,469	4,777	0,000	0,912	22,339	
Pengangguran	0,030	0,007	4,405	0,001			**
PDRB pertanian	0,183	0,391	0,466	0,649			TS
NTP	0,033	0,023	1,431	0,176			TS
RLS	-6,076	1,788	-3,398	0,005			**
UMP	0,000	0,001	0,151	0,882			TS
PDRB total	-0,652	0,399	-1,637	0,126			TS

Keterangan : \*\*= Signifikan pada  $\alpha = 5\%$   
 TS = Tidak signifikan

Berdasarkan hasil analisis dari tabel di atas, diperoleh nilai koefisien konstanta sebesar 54,781 dengan persamaan regresi yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = 54,781 + 0,030X_1 + 0,183X_2 + 0,033X_3 - 6,076X_4 + 0,000X_5 - 0,652X_6$$

Keterangan :

Y = Persentase penduduk miskin

X<sub>1</sub> = Pengangguran

X<sub>2</sub> = PDRB Pertanian

X<sub>3</sub> = Nilai Tukar Petani

X<sub>4</sub> = Rata-rata Lama Sekolah

X<sub>5</sub> = Upah Minimum Provinsi

X<sub>6</sub> = PDRB Total

#### 4.4. Pembahasan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di Sumatera Selatan

##### 4.4.1. Pengaruh Pengangguran Terhadap Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dari  $T_{hitung}$  pada variabel pengangguran yaitu 4,405 dengan nilai probabilitas 0,001. Hal ini menunjukkan bahwa pengangguran berpengaruh nyata terhadap persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan dengan taraf  $\alpha = 0,05$ . Koefisien regresi yang diperoleh yaitu 0,030 yang berarti setiap penambahan 1 persen pengangguran, maka akan ada penambahan persentase penduduk miskin sebesar 0,030 persen.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Retnowati dan Harsuti (2017), disimpulkan bahwa pengangguran berpengaruh secara signifikan

terhadap kemiskinan. Kenaikan jumlah pengangguran yang berpengaruh secara signifikan akan mengakibatkan kemiskinan menguat. Pengangguran berdampak mengurangi pendapatan masyarakat, sehingga akan menurunkan tingkat kemakmuran yang akan dicapai. Jika seseorang tidak bekerja atau menganggur, maka konsekuendinya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan baik dan menyebabkan para penganggur harus mengurangi pengeluaran konsumsinya. Jika kebutuhannya tidak terpenuhi dampaknya mereka masuk dalam kategori penduduk miskin dan akan mengakibatkan jumlah penduduk miskin semakin bertambah.

#### **4.4.2. Pengaruh PDRB Pertanian Terhadap Persentase Penduduk Miskin**

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dari  $T_{hitung}$  pada variabel PDRB pertanian yaitu 0,446 dengan nilai probabilitas 0,649. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB pertanian tidak berpengaruh nyata terhadap persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan dengan taraf  $\alpha = 0,05$ . Koefisien regresi yang diperoleh yaitu 0,183 yang berarti setiap penambahan 1 persen PDRB pertanian, maka akan ada penambahan persentase penduduk miskin sebesar 0,183 persen.

Hasil penelitian di atas tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dama (2016) yang mengatakan pada penelitiannya bahwa Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. PDRB mempunyai peran paling penting bagi pertumbuhan ekonomi khususnya dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan. Akan tetapi, menurut pendapat World Bank (2006) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi belum bisa disimpulkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan, karena disebabkan oleh terjadinya ketimpangan pendapatan antar daerah.

#### **4.4.3. Pengaruh Nilai Tukar Petani Terhadap Persentase Penduduk Miskin**

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dari  $T_{hitung}$  pada variabel nilai tukar petani yaitu 1,431 dengan nilai probabilitas 0,176. Hal ini menunjukkan bahwa nilai tukar petani tidak berpengaruh nyata terhadap persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan dengan taraf  $\alpha = 0,05$ . Koefisien regresi yang diperoleh yaitu

0,033 yang berarti setiap penambahan 1 persen nilai tukar petani, maka akan ada penambahan persentase penduduk miskin sebesar 0,033 persen.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Asmara dan Hanani (2016) mengatakan bahwa peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) berarti proporsi laju kenaikan harga yang diterima petani lebih tinggi daripada laju kenaikan harga yang dibayar petani. Pada kondisi demikian maka NTP yang konstan di nilai lebih memadai, karena pada NTP yang konstan berarti perubahan harga yang diterima petani meningkat (atau menurun) secara proporsional dengan dengan perubahan harga yang dibayar petani. Oleh karena itu, kebijakan mempertahankan laju peningkatan NTP secara proporsional lebih penting daripada meningkatkan nilai NTP itu sendiri.

#### **4.4.4. Pengaruh Rata-rata Lama Sekolah Terhadap Persentase Penduduk Miskin**

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dari  $T_{hitung}$  pada variabel rata-rata lama sekolah yaitu -3,398 dengan nilai probabilitas 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa variabel rata-rata lama sekolah berpengaruh nyata terhadap persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan dengan taraf  $\alpha = 0,05$ . Namun memiliki hubungan negatif, semakin tinggi rata-rata lama sekolah semakin rendah persentase penduduk miskin. Artinya Koefisien regresi yang diperoleh yaitu -6,076 yang berarti setiap penambahan 1 persen rata-rata lama sekolah, maka akan mengurangi persentase penduduk miskin sebesar 6,076 persen.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Suhartini (2011) hasil tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa pendidikan di banyak negara merupakan cara untuk menyelamatkan diri seseorang dari kemiskinan. Dimana digambarkan dengan seseorang yang miskin diharapkan memiliki pekerjaan yang baik serta penghasilan yang tinggi maka harus mempunyai tingkat pendidikan yang tinggi pula. Tetapi, pendidikan yang tinggi hanya mampu dicapai oleh orang-orang yang mampu atau orang-orang kaya. Sedangkan orang miskin tidak mempunyai cukup uang untuk membiayai pendidikannya sendiri hingga ke tingkat yang lebih tinggi seperti sekolah lanjutan dan universitas yang mereka inginkan.

#### 4.4.5. Pengaruh Upah Minimum Provinsi Sekolah Terhadap Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dari  $T_{hitung}$  pada variabel upah minimum provinsi yaitu 0,151 dengan nilai probabilitas 0,882. Hal ini menunjukkan bahwa upah minimum provinsi tidak berpengaruh nyata terhadap persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan dengan taraf  $\alpha = 0,05$ . Koefisien regresi yang diperoleh yaitu 0,000 yang berarti setiap penambahan 1 persen upah minimum provinsi, maka akan ada penambahan persentase penduduk miskin sebesar 0,000 persen.

Berdasarkan penelitian Gindling dan Terrell (2010), dalam penelitiannya mengstimasi dampak upah minimum terhadap kemiskinan, dan diperoleh hasil bahwa kenaikan upah minimum mengurangi kemiskinan. Akan tetapi, upah minimum tidak mempunyai pengaruh pada individu yang bekerja pada sektor swasta kecil (*small private sector*), wirausaha (*self-employment*) atau sektor publik (*public sector*).

#### 4.4.6. Pengaruh PDRB Total Terhadap Persentase Penduduk Miskin

Berdasarkan hasil regresi yang diperoleh dari  $T_{hitung}$  pada variabel PDRB total yaitu -1,637 dengan nilai probabilitas 0,126. Hal ini menunjukkan bahwa PDRB total tidak berpengaruh nyata terhadap persentase penduduk miskin di Sumatera Selatan dengan taraf  $\alpha = 0,05$ . Koefisien regresi yang diperoleh yaitu -0,652 yang berarti setiap penambahan 1 persen PDRB total, maka akan mengurangi persentase penduduk miskin sebesar 0,652 persen.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Suliswanto (2010). Pada penelitian tersebut mengatakan bahwa variabel PDRB memiliki signifikansi pengaruh terhadap kemiskinan hanya pada  $\alpha = 20\%$ . Hal ini sesuai dengan temuan dari World Bank (2006) bahwa pertumbuhan ekonomi belum dapat secara signifikan mengurangi kemiskinan dikarenakan pola dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia yaitu terjadinya ketimpangan sejak tahun 1998 pertumbuhan bukan hanya berjalan dengan tingkat yang lebih rendah, akan tetapi juga menjadi semakin kurang merata. Sehingga mengakibatkan jumlah penduduk miskin tidak akan dapat dikurangi secara signifikan tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang



bermanfaat bagi masyarakat miskin. Menurut World Bank (2006) pada saat periode setelah krisis ekonomi, berkurangnya penduduk miskin lebih banyak disebabkan karena membaiknya stabilitas ekonomi dan turunnya harga bahan makanan.

#### **4.5. Pengujian Terhadap Model Regresi**

##### **4.5.1. Uji Koefisien Determinasi**

Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) digunakan untuk mengetahui tingkat ketepatan dalam analisis regresi. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya koefisien determinasi ( $R^2$ ) antara 0 sampai dengan 1. Nilai  $R^2$  paling besar 1 dan paling kecil 0 ( $0 < R^2 < 1$ ). Bila  $R^2$  sama dengan 0 maka garis regresi tidak dapat digunakan untuk membuat ramalan variabel dependen, karena variabel-variabel yang dimasukkan ke dalam persamaan regresi tidak mempunyai pengaruh variasi dependen adalah 0.

Berdasarkan dari hasil dari tabel di atas, diperoleh hasil dari nilai *R square* sebesar 0,912. Hal ini berarti menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 0,912 persen, sedangkan sisanya 8,8 persen dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini, yang berarti masih terdapat variabel independen lain yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan.

##### **4.5.2. Uji F**

Uji F pada penelitian ini merupakan uji yang digunakan untuk melihat apakah terjadi pengaruh nyata antara variabel independent terhadap variabel dependent secara keseluruhan. Berdasarkan uji F diperoleh pengaruh secara simultan enam variabel independen yaitu pengangguran, PDRB pertanian, nilai tukar petani, rata-rata lama sekolah, upah minimum provinsi dan PDRB total terhadap variabel dependen, yaitu kemiskinan sebagai berikut.

Dari hasil perhitungan yang diperoleh  $F_{hitung}$  sebesar 22,339. Berdasarkan tabel F dengan tingkat signifikansi ( $\alpha$ ) = 5 persen. Diketahui bahwa  $T_{tabel}$  dengan  $df_1 = k-1 = 6-1 = 5$  dan  $df_2 = n-k = 20-6 = 14$ . Maka hasil dari  $F_{tabel}$  adalah 2,958. Berdasarkan hasil dari perhitungan diperoleh  $F_{hitung} = 22,339$  sedangkan  $F_{tabel}$  2,958, maka  $F_{hitung} > F_{tabel}$ . Hal ini menunjukkan bahwa  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel independen yaitu pengangguran, PDRB pertanian, nilai tukar petani, rata-rata lama sekolah, upah minimum provinsi dan PDRB total berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen persentase penduduk miskin.

#### 4.5.3. Uji T

Uji T pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing-masing variabel independent secara individual (parsial) terhadap variabel dependent. Untuk membuktikan ada tidaknya pengaruh maka, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penentuan hipotesis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

Ho : Pengangguran, PDRB pertanian, nilai tukar petani, rata-rata lama sekolah, upah minimum provinsi dan PDRB total berpengaruh signifikan terhadap persentase penduduk miskin.

Ha : Pengangguran, PDRB pertanian, nilai tukar petani, rata-rata lama sekolah, upah minimum provinsi dan PDRB total secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap persentase penduduk miskin.

2. Penentuan tingkat signifikansi

Tingkat signifikansi dalam penelitian ini yaitu sebesar 0,05 (5%) dengan tingkat kepercayaan 0,95 (95%) yang dapat dilihat pada Tabel 4.5.

3. Penentuan  $T_{hitung}$  dan  $T_{tabel}$

Uji T dilakukan dengan cara membandingkan nilai  $T_{hitung}$  yang diperoleh dari tabel di atas, dengan tingkat signifikansi 0,05 dan derajat kebebasan ( $df$ ) =  $n-k = 20-6 = 14$ . Dengan ketentuan tersebut maka diperoleh hasil  $T_{tabel}$  sebesar 1,761.

4. Penarikan kesimpulan

- a. Pengangguran ( $X_1$ )

Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya pengangguran secara parsial berpengaruh positif terhadap persentase penduduk miskin.

- b. PDRB pertanian

Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya PDRB pertanian secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap persentase penduduk miskin.

c. Nilai tukar petani

Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya nilai tukar petani secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap persentase penduduk miskin.

d. Rata-rata lama sekolah

Ho diterima dan Ha ditolak. Artinya rata-rata lama sekolah secara parsial berpengaruh positif terhadap persentase penduduk miskin.

e. Upah minimum provinsi

Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya upah minimum provinsi secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap persentase penduduk miskin.

f. PDRB total

Ho ditolak dan Ha diterima. Artinya PDRB total secara parsial tidak berpengaruh positif terhadap persentase penduduk miskin

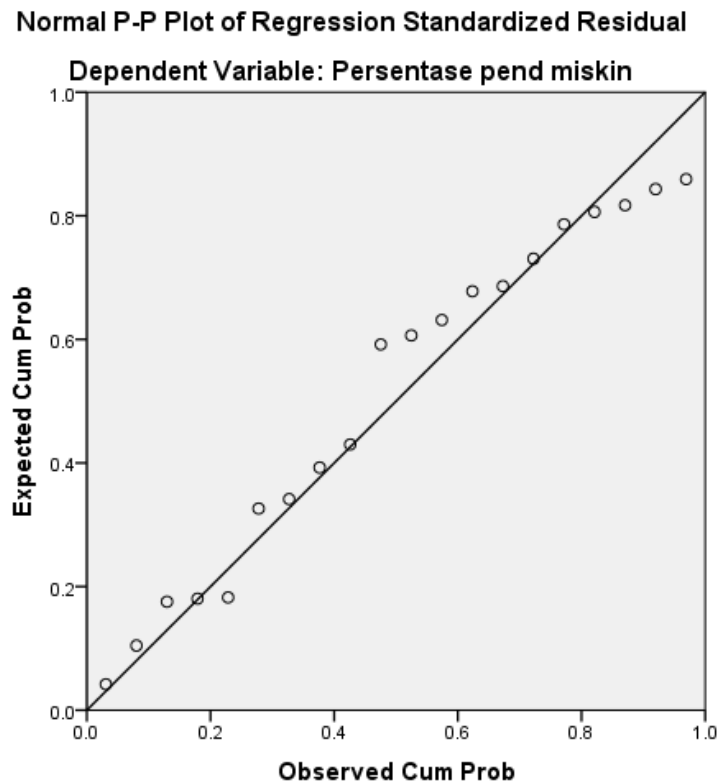
#### 4.6. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah suatu analisis yang digunakan untuk menilai apakah di dalam sebuah model regresi linear berganda terdapat masalah-masalah asumsi klasik. Uji asumsi klasik bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa persamaan regresi yang didapatkan memiliki ketepatan dalam estimasi, tidak bias dan konsisten. Adapun uji asumsi klasik yang dikemukakan dalam penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor sosial ekonomi apa saja yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan antara lain: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji autokorelasi yang dapat dilihat sebagai berikut.

##### 4.6.1. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan suatu bentuk pengujian tentang kenormalan distribusi suatu data atau variabel. Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan apakah berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Model regresi yang baik yaitu yang memiliki distribusi normal atau mendekatinya. Untuk mengetahui uji normalitas yaitu dengan cara melihat probability plot dimana distribusi normal akan membentuk garis diagonal. Jika hasil distribusi data normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya

akan berada di sekitar garis diagonal. Berikut adalah hasil dari uji normalitas yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.2. Grafik P-P Plot Uji Normalitas

Berdasarkan Gambar 4.2. di atas, pada visual gambar *probability plot* dimana titik-titik residual data berada di dekat atau mengikuti garis diagonalnya, maka dapat dikatakan bahwa data *probability plot* pada gambar model regresi penelitian ini berdistribusi normal dengan mengikuti pola garis lurus normalitas.

#### 4.6.2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independent yang memiliki korelasi antar variabel independent yang lain dalam satu model. Multikolinearitas diuji dengan melihat nilai *tolerance* yang  $>0,100$  dan *variance inflation factor* (VIF) yang  $<10,00$  sehingga model dapat dikatakan terbebas dari Multikolinearitas. Berikut adalah hasil dari uji multikolinearitas yang dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6. Nilai *Tolerance* dan VIF Uji Multikolinearitas

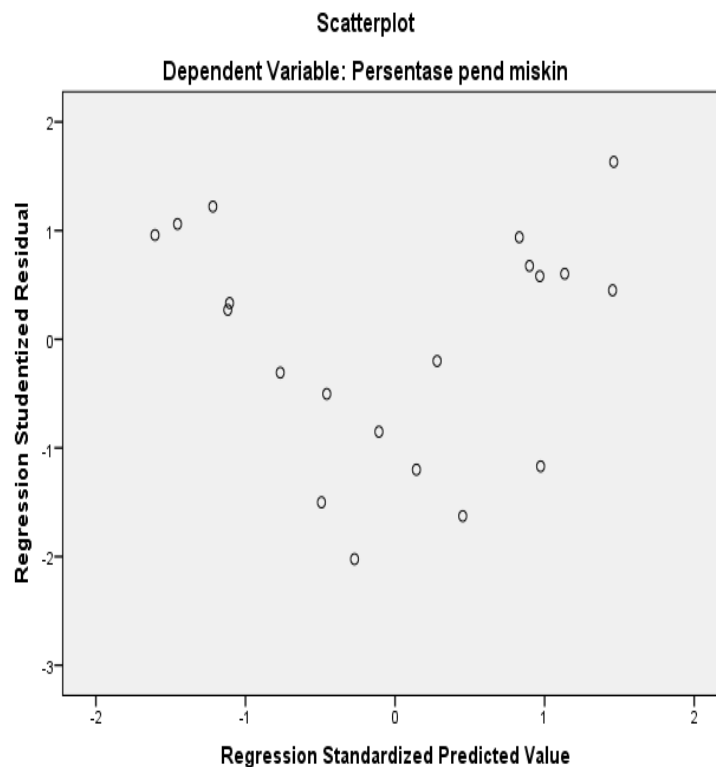
Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
(Constant)			
X1	0,523	1,912	Tidak terjadi multikolinearitas
X2	0,226	4,429	Tidak terjadi multikolinearitas
X3	0,546	1,832	Tidak terjadi multikolinearitas
X4	0,173	5,797	Tidak terjadi multikolinearitas
X5	0,145	6,906	Tidak terjadi multikolinearitas
X6	0,447	2,237	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: *Output SPSS 20*

Berdasarkan Tabel 4.7. di atas, menunjukkan bahwa hasil dari nilai *tolerance* yang di dapat  $<0,100$  dan VIF pada masing-masing variabel  $>10,00$ . Jadi, dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel bebas pada penelitian ini yaitu pengangguran, PDRB pertanian, nilai tukar petani, rata-rata lama sekolah, upah minimum provinsi dan PDRB total tidak menunjukkan adanya gejala multikolinearitas atau tidak terdapat korelasi antara variabel-variabel bebas tersebut.

#### 4.6.3. Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas adalah uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Apabila asumsi heterokedastisitas tidak terpenuhi, maka model regresi dinyatakan tidak valid. Ada tidaknya Heteroskedastisitas dapat di prediksi dengan melihat pola gambar Scatterplot. Metode scatterplot ini digunakan dengan cara melihat polagambar Scatterplot. Metode scatterplot ini digunakan dengan cara melihat grafik scatterplot antara *standardized predicted value* (ZPRED) dengan *studentized residual* (SRESID). Ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah yang diprediksi dan sumbu X adalah residual. Berikut adalah hasil dari scatterplot uji heterokedastisitas.



Gambar 4.3. *Scatterplot* Hasil Uji Heterokedastisitas

Dari Gambar 4.3. di atas, hasil pengolahan data uji heterokedastisitas yang dilihat menunjukkan bahwa tidak terdapat heterokedastisitas pada model regresi ini. Hal ini dapat dilihat dari Scatterplot yang menunjukkan terdapat titik-titik data yang tersebar di atas, di bawah dan di sekitar angka nol, serta penyebaran yang menunjukkan titik data tidak berpola.

#### 4.6.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji dalam model regresi linear ada atau tidaknya korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu  $t-1$  atau periode sebelumnya. Uji autokorelasi pada penelitian ini menggunakan uji Durbin Watson. Model regresi yang baik adalah model regresi yang bebas dari autokorelasi.

Dari hasil pengujian menggunakan uji Durbin Watson, residual persamaan regresi diperoleh angka Durbin Watson sebesar 1,450, sebagai pedoman umum Durbin Watson berkisar antara 0 dan 4. Jika nilai dari uji statistik Durbin Watson lebih kecil dari satu atau lebih besar dari tiga, maka residual error dari model regresi

tidak terjadi autokorelasi. Artinya hasil uji statistik Durbin Watson pada penelitian ini berada diatas satu dan di bawah tiga (1,450) sehingga dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi.

#### **4.7. Upaya Menurunkan Tingkat Kemiskinan Dalam Mendukung Target *Sustainable Development Goals* di Sumatera Selatan**

Berdasarkan data persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2030 diperkirakan akan menurun menjadi 5,87 persen. Meskipun angka tersebut terbilang kecil namun tidak menutup kemungkinan masih adanya penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh karena itu, diperlukan adanya upaya untuk menurunkan tingkat kemiskinan dalam mendukung serta mewujudkan target dari *Sustainable Development Goals* agar tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan menurun pada saat selesainya periode SDGs dengan menggunakan analisis SWOT.

Untuk mendukung salah satu target atau tujuan dari *Sustainable Development Goals* yaitu tanpa kemiskinan (*no poverty*), diperlukan strategi untuk dalam upaya mempercepat penurunan kemiskinan yang dapat diterapkan di Sumatera Selatan seperti:

Tabel. 4.7. Hasil Matriks Analisis SWOT

Faktor Eksternal          Faktor Internal	Strengths (S)	Weakness (W)
	1) Tersedianya lahan pertanian yang dapat dikelola 2) Pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi 3) Beasiswa dan sekolah gratis	1) Kurangnya lapangan pekerjaan 2) Kurangnya keterampilan SDM
Opportunities (O)	Strategi S-O	Strategi W-O
1) Penurunan angka kemiskinan 2) Meningkatkan potensi ekonomi daerah 3) Meningkatkan kualitas SDM di bidang perencanaan daerah	1) Menurunkan angka kemiskinan dengan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan 2) Meningkatkan perekonomian provinsi dengan memberikan program pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi khususnya di daerah tertinggal	1) Memperkuat pemerintah Provinsi dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan 2) Meningkatkan keterampilan SDM di bidang perencanaan daerah
Threats (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
1) Tingkat kemiskinan nasional yang masih tinggi 2) Banyak SDM yang kurang produktif	1) Memberikan pelatihan kewirausahaan yang berkaitan dengan SDM guna meningkatkan perekonomian rakyat 2) Mengelola lahan yang ada agar lebih produktif	1) Membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi tingkat kemiskinan nasional 2) Memberikan bantuan berupa pelatihan, permodalan serta sarana/prasarana lainnya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.



#### 4.7.1. Strategi Penurunan Tingkat Kemiskinan

Berdasarkan hasil matriks analisis SWOT di atas, menunjukkan beberapa strategi yang diperlukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan yaitu sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kemiskinan dengan penganggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Dengan masih adanya masalah ketimpangan dalam segi sosial dan ekonomi akan mengakibatkan tingginya angka kemiskinan di Sumatera Selatan. Diharapkan dengan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan akan menurunkan angka kemiskinan.
2. Meningkatkan perekonomian Provinsi dengan memberikan program pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomikhususnya di daerah tertinggal seperti industri rumah tangga, kelompok tani dan penunjang ekonomi masyarakat lainnya. Kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat dalam program pemberdayaan di sektor ekonomi dapat meningkatkan perekonomian Provinsi.
3. Memperkuat pemerintah provinsi dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan. Pemerintah dapat menyusun program kerja, perumusan kebijakan teknis serta pembinaan dan pengawasan dalam pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan.
4. Meningkatkan keterampilan SDM di bidang perencanaan daerah. Perencanaan daerah dapat tercapai dengan adanya sistem pengelolaan SDM yang baik.
5. Memberikan pelatihan kewirausahaan yang berkaitan dengan SDM guna meningkatkan perekonomian rakyat. Pelatihan kewirausahaan dapat berdampak untuk perbaikan ekonomi rakyat serta berdampak juga pada target pemerintah dalam pengentasan kemiskinan.
6. Mengelola lahan yang ada agar lebih produktif. Masyarakat dapat mengelola lahan atau perkarangan yang ada dan dimanfaatkan dengan baik dan lebih produktif.
7. Membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi tingkat kemiskinan nasional. Penurunan kemiskinan dapat dilakukan dengan cara membuka lapanganpekerjaan serta dapat menjadi solusi untuk mengurangi angka pengangguran di Sumatera Selatan.

8. Memberikan bantuan berupa pelatihan, permodalan, serta sarana/prasarana lainnya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Pemberian bantuan berupa pelatihan, modal, peralatan dan barang kepada masyarakat miskin dapat membantu pengembangan dan perekonomian masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Strategi-strategi tersebut diharapkan dapat menjadi upaya dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan agar tercapainya target dari *sustainable development goals* (SDGs) tahun 2030 yaitu tanpa kemiskinan (*no poverty*).

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan di Provinsi Sumatera Selatan dengan judul “Analisis Faktor-faktor Sosial Ekonomi Yang Mempengaruhi Kemiskinan Dalam Mewujudkan *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Sumatera Selatan”. Maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persentase penduduk miskin di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 1999 hingga tahun 2030 menurun sebanyak 17,62 persen. Diperkirakan tahun 2030 persentase penduduk miskin Sumatera Selatan Sebesar 5,87 persen.
2. Faktor-faktor sosial ekonomi yang berpengaruh nyata terhadap kemiskinan adalah pengangguran dan rata-rata lama sekolah.
3. Strategi yang digunakan untuk menurunkan tingkat kemiskinan di Sumatera Selatan yaitu dengan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan, program pemberdayaan di sektor ekonomi, Memperkuat pemerintah provinsi dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan, meningkatkan keterampilan SDM di bidang perencanaan daerah, memberikan pelatihan kewirausahaan, mengelola lahan yang ada agar lebih produktif, membuka lapangan pekerjaan dan memberikan bantuan berupa pelatihan, permodalan serta sarana/prasarana.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan pemerintah dapat memperbanyak program-program pemberdayaan masyarakat secara luas agar dapat meningkatkan perekonomian sekaligus dapat memberikan dampak terhadap penurunan kemiskinan di Sumatera Selatan.
2. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kemiskinan dan Trend di tengah pandemi Covid-19 ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afinie, A. 2019. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung Tahun 2012-2015 dalam Perspektif Ekonomi Islam. UIN Raden Intan Lampung.
- Arsyad, L. 2016. Ekonomi Pembangunan. Edisi Kelima. STIE YKPN. Yogyakarta.
- Asmara, R., dan N, Hanani. 2016. Tingkat kesejahteraan petani kabupaten Jombang: Pendekatan Nilai Tukar Petani. In Prosiding Seminar Nasional Pembangunan Pertanian.
- Badan Pusat Statistik. 2010. Provinsi Sumatera Selatan Dalam Angka 2010. Provinsi Sumatera Selatan: Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan.
- BKKBN. 2015. Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Cahaya, M. I. 2018. Peramalan Persentase Penduduk Miskin Tahun 2018 Di Kota Pematang Siantar Menggunakan Metode Trend Non Linear. Universitas Sumatera Utara. Medan.
- Dama, H. Y. 2016. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado (Tahun 2005-2014). Gindling, T. H. and K, Terrell. 2010. *Minimum wages, globalization, and poverty in Honduras*. World Development, 38(6), 908-918.
- Hoelman, M. B., B. T. P. Parhusip, S. Eko, S. Bahagijo dan H. Santono. 2015. Panduan SDGs Untuk Pemerintah Daerah (Kota dan Kabupaten) dan Pemangku Kepentingan Daerah. In Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).
- Jundi, M, Adan D, Poerwono. 2014. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Provinsi-Provinsi di Indonesia. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Nasir, M., M. Saichudin dan Maulizar. 2008. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Kabupaten Purworejo. Lipi: Jakarta.
- Nugroho, H. 1995. Kemiskinan, Ketimpangan, dan Kesenjangan. Yogyakarta: Aditya Media.
- Panuluh, S dan M. R. Fitri. 2016. Perkembangan Pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia. Diakses di [www.infid.org](http://www.infid.org) pada 19 Oktober 2019.

- Retnowati, D., S. M dan Harsuti. 2017. Pengaruh Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Jawa Tengah. *Sustainable Competitive Advantage (SCA)*, 6(1).
- Sasana, H. 2006. Analisis dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Pembangunan (JDP)*, 3(Nomor 2), 146-170.
- Soesastro, H. 2005. *Pemikiran Dan Permasalahan Ekonomi Di Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Spicker, P. 2002. *Poverty and the welfare state: Dispelling the myths*. London: Catalyst.
- Suhartini, A. M. A. 2011. *Pro Poor Growth Tingkat Provinsi Di Indonesia*. Institut Pertanian Bogor. Bogor.
- Sukirno, S. 2006. *Ekonomi Pembangunan Edisi Kedua*. Prenada: Jakarta.
- Suliswanto, M. S. W. 2010. Pengaruh produk domestik bruto (pdb) dan indeks pembangunan manusia (ipm) terhadap angka kemiskinan di indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 8(2), 357-366.
- Suryandari, A. N. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan Terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi *DIY Tahun 2004-2014*. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 7(1), 33-4.
- Wahyuningsih, W. 2018. Millenium Development Goals (MDGS) dan Sustainable Development Goals (SDGS) Dalam Kesejahteraan Sosial. *Bisma* , 11(3), 390-399.
- World Bank. 2006. *Making the New Indonesia Work for The Poor*. World Bank, Jakarta.

# LAMPIRAN

## Lampiran 1. Peta Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: saripedia.wordpress

## Lampiran 2. Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Kabupaten/Kota	Luas (km <sup>2</sup> )	Persentase (%)
<b>Kabupaten</b>		
1. Ogan Komering Ulu	3.747,77	4,29
2. Ogan Komering Ilir	17.086,39	19,54
3. Muara Enim	6.901,36	7,89
4. Lahat	4.297,12	4,29
5. Musi Rawas	6.330,53	7,24
6. Musi Banyuasin	14.530,36	16,62
7. Banyuasin	12.361,43	14,14
8. Oku Selatan	4.544,18	5,20
9. Oku Timur	3.397,10	3,89
10. Ogan Ilir	2.411,24	2,76
11. Empat Lawang	2.312,20	2,64
12. PALI	1.844,71	2,11
13. Musi Rawas Utara	5.836,70	6,68
<b>Kota</b>		
1. Palembang	363,68	0,42
2. Prabumulih	458,11	0,52
3. Pagar Alam	632,80	0,72
4. Lubuk Linggau	365,49	0,42



Lampiran 3. Jumlah Penduduk berdasarkan Jenis kelamin di Sumatera Selatan

Penduduk	Jumlah	Persentase (%)
Laki-laki	4.117.487	49,19
Perempuan	4.252.833	50,81
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>8.370.320</b>	<b>100,00</b>

Lampiran 4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur di Sumatera Selatan

Kelompok Umur	Jumlah	Persentase (%)
0 – 4	797.318	9,53
5 – 9	801.024	9,57
10 – 14	759.604	9,07
15 – 19	721.902	8,62
20 – 24	694.519	8,30
25 – 29	699.484	8,36
30 – 34	701.267	8,38
35 – 39	663.826	7,93
40 – 44	591.240	7,06
45 – 49	508.913	6,08
50 – 54	429.950	5,14
55 – 59	352.449	4,21
60 – 64	261.491	3,12
65 – 69	169.798	2,03
70 – 74	107.002	1,28
75 +	110.533	1,32
<b>Sumatera Selatan</b>	<b>8.370,320</b>	<b>100,00</b>

Lampiran 5. Data Peramalan Persentase Penduduk Miskin Sumatera Selatan

Tahun aktual	Jumlah Penduduk		Persentase	
	Miskin	penduduk miskin	Selisih	
1999	7.633.800	23.49	0.00	
2000	7.757.300	17.37	6.12	
2001	6.343.104	16.07	1.30	
2002	6.430.188	22.49	-6.42	
2003	6.518.791	21.54	0.95	
2004	6.628.416	20.92	0.62	
2005	6.755.900	21.01	-0.09	
2006	6.899.892	20.99	0.02	
2007	7.019.964	19.15	1.84	
2008	7.121.790	17.73	1.42	
2009	7.222.635	16.28	1.45	
2010	7.481.604	14.80	1.48	
2011	7.598.500	13.95	0.85	
2012	7.714.300	13.48	0.47	
2013	7.828.700	14.06	-0.58	
2014	7.941.500	13.62	0.44	
2015	8.052.300	13.77	-0.15	
2016	8.160.900	13.39	0.38	
2017	8.267.000	13.10	0.29	
2018	8.370.300	12.43	0.67	
Tahun peramalan				
2019		11.55	0.88	
2020		11.04	0.51	
2021		10.52	0.52	
2022		10.00	0.52	
2023		9.49	0.51	
2024		8.97	0.52	
2025		8.45	0.52	
2026		7.94	0.51	
2027		7.42	0.52	
2028		6.90	0.52	
2029		6.38	0.52	
2030		5.87	0.51	

## Lampiran 6. Jumlah Penduduk Miskin Sumatera Selatan

Tahun	Jumlah	Persentase
1999	1.481.900	23.49
2000	1.338.000	17.37
2001	1.113.800	16.07
2002	1.434.100	22.49
2003	1.379.100	21.54
2004	1.379.300	20.92
2005	1.429.000	21.01
2006	1.446.900	20.99
2007	1.331.800	19.15
2008	1.249.610	17.73
2009	1.167.870	16.28
2010	1.105.000	14.80
2011	1.043.620	13.95
2012	1.061.870	13.48
2013	1.104.570	14.06
2014	1.085.800	13.62
2015	1.112.530	13.77
2016	1.096.500	13.39
2017	1.086.760	13.10
2018	1.076.400	12.43

## Lampiran 7. Jumlah Pengangguran di Sumatera Selatan

No.	Tahun	Jumlah
1	1999	188.200
2	2000	183.958
3	2001	101.519
4	2002	316.047
5	2003	303.547
6	2004	282.255
7	2005	297.847
8	2006	310.851
9	2007	314.814
10	2008	280.657
11	2009	263.471
12	2010	243.851
13	2011	217.569
14	2012	213.441
15	2013	182.376
16	2014	192.868
17	2015	238.921
18	2016	180.157
19	2017	181.135
20	2018	175.100

## Lampiran 8. PDRB Sektor Pertanian Sumatera Selatan

No.	Tahun	Jumlah	Data yang di konversi
1	1999	2.840.526	50.561.362
2	2000	2.987.527	53.177.980
3	2001	2.666.724	47.467.687
4	2002	2.756.630	49.068.014
5	2003	2.770.143	49.308.545
6	2004	9.136.223	50.249.226
7	2005	9.805.678	53.931.229
8	2006	10.437.334	57.405.447
9	2007	11.113.699	61.125.344
10	2008	11.567.788	63.622.834
11	2009	11.927.069	65.598.879
12	2010	12.481.769	68.649.729
13	2011	13.131.607	72.223.838
14	2012	13.842.531	76.133.920
15	2013	14.508.814	79.798.477
16	2014	46.612.030	46.612.030
17	2015	47.222.767	48.229.767
18	2016	48.229.767	49.033.651
19	2017	49.899.152	49.899.152
20	2018	50.587.559	50.587.559

## Lampiran 9. Nilai Tukar Petani Sumatera Selatan

No.	Tahun	Jumlah
1	1999	102.40
2	2000	92.00
3	2001	76.30
4	2002	72.50
5	2003	73.30
6	2004	107.90
7	2005	119.50
8	2006	136.80
9	2007	142.00
10	2008	101.49
11	2009	99.70
12	2010	104.89
13	2011	109.63
14	2012	110.13
15	2013	110.22
16	2014	100.92
17	2015	96.87
18	2016	94.58
19	2017	95.03
20	2018	93.62

Lampiran 10. Rata-rata Lama Sekolah di Sumatera Selatan

No	Tahun	Rata-rata
1	1999	6,6
2	2000	6,85
3	2001	7,04
4	2002	7,1
5	2003	7,24
6	2004	7,39
7	2005	7,54
8	2006	7,6
9	2007	7,6
10	2008	7,6
11	2009	7,66
12	2010	7,82
13	2011	7,84
14	2012	7,99
15	2013	8,04
16	2014	7,66
17	2015	7,77
18	2016	7,83
19	2017	7,99
20	2018	8



## Lampiran 11. Upah Minimum Provinsi di Sumatera Selatan

No.	Tahun	Jumlah
1	1999	170.000
2	2000	190.000
3	2001	255.000
4	2002	331.500
5	2003	403.500
6	2004	460.000
7	2005	503.700
8	2006	604.000
9	2007	662.000
10	2008	743.000
11	2009	824.730
12	2010	927.825
13	2011	1.048.440
14	2012	1.195.220
15	2013	1.630.000
16	2014	1.825.000
17	2015	1.974.346
18	2016	2.206.000
19	2017	2.388.000
20	2018	2.595.994

Lampiran 12. PDRB Total Atas Dasar Harga Konstan Sumatera Selatan

No	Tahun	Jumlah	Konversi
1	1999	2.840.526	50.561.362
2	2000	2.987.527	53.177.980
3	2001	2.666.724	47.467.687
4	2002	2.756.630	49.068.014
5	2003	2.770.143	49.308.545
6	2004	9.136.223	50.249.226
7	2005	9.805.678	53.931.229
8	2006	10.437.334	57.405.447
9	2007	11.113.699	61.125.344
10	2008	11.567.788	63.622.834
11	2009	11.927.069	65.598.879
12	2010	12.481.769	68.649.729
13	2011	13.131.607	72.223.838
14	2012	13.842.531	76.133.920
15	2013	14.508.814	79.798.477
16	2014	46.612.030	46.612.030
17	2015	47.222.767	48.229.767
18	2016	48.229.767	49.033.651
19	2017	49.899.152	49.899.152
20	2018	50.587.559	50.587.559

## Lampiran 13. Hasil Regresi Menggunakan Aplikasi SPSS

**Descriptive Statistics**

	Mean	Std. Deviation	N
Persentase pend miskin	16.9820	3.64957	20
Pengangguran	233.42920	60.670026	20
PDRB pertanian	4.2265	1.61859	20
NTP	101.9890	17.79092	20
RLS	7.5580	.40529	20
UMP	1046.91275	780.188038	20
PDRB total	4.9095	1.12937	20

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.955 <sup>a</sup>	.912	.871	1.31193	1.450

a. Predictors: (Constant), PDRB total, Pengangguran, UMP, NTP, PDRB pertanian, RLS

b. Dependent Variable: Persentase pend miskin

**ANOVA<sup>a</sup>**

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	230.693	6	38.449	22.339	.000 <sup>b</sup>
	Residual	22.375	13	1.721		
	Total	253.068	19			

a. Dependent Variable: Persentase pend miskin

b. Predictors: (Constant), PDRB total, Pengangguran, UMP, NTP, PDRB pertanian, RLS

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	54.781	11.469		4.777	.000		
Pengangguran	.030	.007	.502	4.405	.001	.523	1.912
PDRB pertanian	.183	.391	.081	.466	.649	.226	4.429
NTP	.033	.023	.160	1.431	.176	.546	1.832
RLS	-6.076	1.788	-.675	-3.398	.005	.173	5.797
UMP	.000	.001	.033	.151	.882	.145	6.906
PDRB total	-.652	.399	-.202	-1.637	.126	.447	2.237

**Collinearity Diagnostics<sup>a</sup>**

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions						
				(Constant)	Pengangguran	PDRB pertanian	NTP	RLS	UMP	PDRB total
1	1	6.499	1.000	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
	2	.391	4.077	.00	.01	.01	.00	.00	.10	.00
	3	.050	11.377	.00	.02	.26	.00	.00	.05	.02
	4	.033	13.995	.00	.53	.00	.03	.00	.10	.17
	5	.015	21.130	.00	.32	.20	.16	.00	.05	.78
	6	.012	23.606	.01	.12	.25	.80	.00	.00	.00
	7	.000	153.994	.99	.00	.26	.00	.99	.69	.02

a. Dependent Variable: Persentase pend miskin

Lampiran 14. Hasil Matriks Analisis SWOT

Faktor Eksternal	Strengths (S)	Weakness (W)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tersedianya lahan pertanian yang dapat dikelola</li> <li>2) Pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi</li> <li>3) Beasiswa dan sekolah gratis</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Kurangnya lapangan pekerjaan</li> <li>2) Kurangnya keterampilan SDM</li> </ul>
Faktor Internal		
Opportunities (O)	Strategi S-O	Strategi W-O
<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penurunan angka kemiskinan</li> <li>2) Meningkatkan potensi ekonomi daerah</li> <li>3) Meningkatkan kualitas SDM di bidang perencanaan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Menurunkan angka kemiskinan dengan penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan</li> <li>2) Meningkatkan perekonomian provinsi dengan memberikan program pemberdayaan masyarakat di sektor ekonomi khususnya di daerah tertinggal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Memperkuat pemerintah Provinsi dalam pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan</li> <li>2) Meningkatkan keterampilan SDM di bidang perencanaan daerah</li> </ul>
Threats (T)	Strategi S-T	Strategi W-T
<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Tingkat kemiskinan nasional yang masih tinggi</li> <li>2) Banyak SDM yang kurang produktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Memberikan pelatihan kewirausahaan yang berkaitan dengan SDM guna meningkatkan perekonomian rakyat</li> <li>2) Mengelola lahan yang ada agar lebih produktif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Membuka lapangan pekerjaan untuk mengurangi tingkat kemiskinan nasional</li> <li>2) Memberikan bantuan berupa pelatihan, permodalan serta sarana/prasarana lainnya untuk meningkatkan produktivitas masyarakat.</li> </ul>